



R. HADI PURNOMO, SH
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
BADAN-BADAN PERADILAN
(1970 - 1975)



SOEROTO, SH
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
BADAN PERADILAN UMUM
(1975 - 1982)



H. ROESLI, SH
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
BADAN PERADILAN UMUM
(1982 - 1988)



H. ZAKIR, SH
DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM DAN T.U.N
(1988 - 1992)



SOELISTYOWATI SOEGONDO, SH
DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM DAN T.U.N
(1992 - 1997)

**DIREKTUR
JENDERAL BADAN
PERADILAN
UMUM
(Tahun 1970 sampai
sekarang)**



H. PARMAN SOEPARMAN, SH
DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM DAN T.U.N
(1997 - 2000)



SOEJATNO, SH
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
(2000 - 2005)



M. HATTA ALI, SH., MH
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
(2005 - 2007)

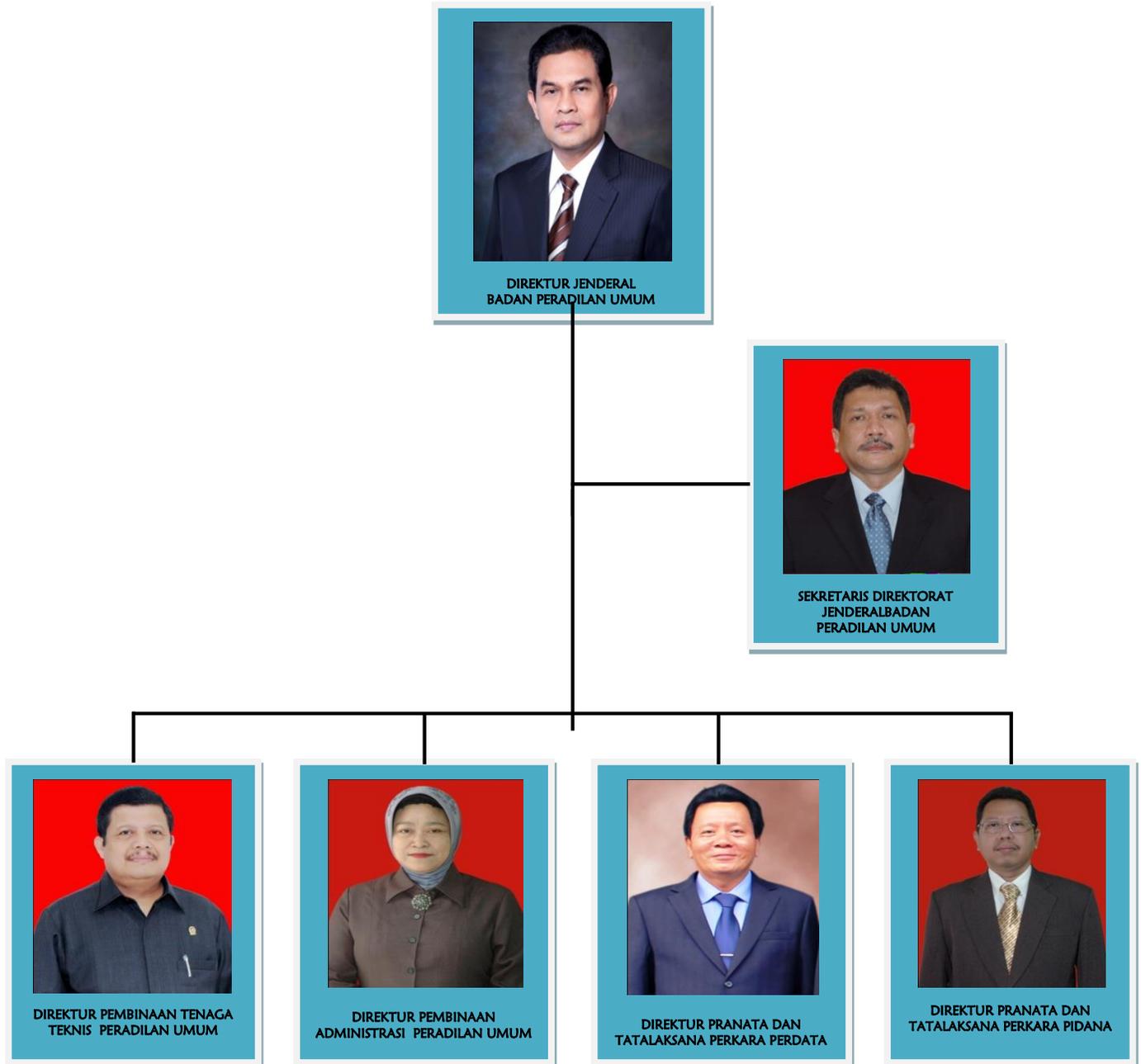


CICUT SUTIARSO
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
(2008 - 2013)



HERRI SWANTORO, SH., MH
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
(2014-Sekarang)

UNSUR PIMPINAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM





**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Dipimpin oleh :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Dibantu Oleh :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;
Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata;
Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana.**

Kata Pengantar

Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi yang terangkum dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam satu tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2015-2019 dengan berbagai agenda kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta dukungan dalam bentuk koordinasi, asistensi dan pemanfaatan informasi hingga terwujudnya capaian kinerja menyeluruh pada setiap tugas pokok dan fungsi di berbagai bidang tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun yang berkaitan dengan pelayanan Administrasi pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum.

Seperti tahun sebelumnya tahun ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Pembaharuan dalam peningkatan kinerjanya berupa Inovasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan yang telah dilaksanakan pada dua (2) pengadilan sebagai tahap awal yaitu Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, selanjutnya tahun 2016 akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri lainnya.

Capaian dan keberhasilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ditandai dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 di salah satu unit di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Hal ini kiranya tidak membuat kita berpuas diri, akan tetapi marilah kita berupaya secara terus menerus meningkatkan kinerja sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Tahunan ini, semoga kerja keras kita dapat membawa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mewujudkan visi lembaga kita terbentuknya Peradilan yang Agung.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



H. HERRI SWANTORO, S.H.,M.H.
NIP. 19590904 198403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum	1
B. Visi dan Misi.....	2
C. Rencana Strategis.....	2
BAB.II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI).....	4
A. Standar Operasional Prosedur.....	7
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP).....	8
C. Pelaksanaan Kegiatan.....	8
BAB.III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.....	21
A. Sumber Daya Manusia (SDM).....	21
B. Keadaan Perkara.....	34
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	78
D. Pengelolaan Keuangan.....	86
E. Dukungan Teknologi Informasi.....	89
F. Regulasi Tahun 2015.....	90
BAB.IV PENGAWASAN.....	95
A. Internal.....	95
B. Evaluasi.....	96
BAB.V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dalam rangka Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai Standar Sertifikasi ISO 9001:2008 dengan penerapan *International Framework Court Excellence*, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan, Zona Integritas dan Standar Penilaian Kinerja Pengadilan yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2014. Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan ini telah dilaksanakan pada dua (2) pengadilan sebagai tahap awal yaitu Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang selanjutnya akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri lainnya.

Capaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ditandai dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 di unit Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan pencanangan Zona Integritas di 3 (tiga) Pengadilan Negeri sebagai *pilot project* serta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan tahun 2015 yang diselenggarakan Mahkamah Agung bekerja sama dengan *ILEAD UI* diikuti oleh 238 pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan dengan jumlah inovasi sebanyak 338 inovasi yang memenuhi syarat, diantaranya 7 (tujuh) pengadilan negeri di lingkungan Peradilan Umum mendapatkan penghargaan 10 besar yaitu:

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan inovasi “Menghitung sendiri Panjar Biaya Perkara (e-SKUM)”;

2. Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan inovasi “Mediasi *Teleconference*”;
3. Pengadilan Negeri Samarinda dengan inovasi “*Computerized* Sistem dalam Pengarsipan Perkara”;
4. Pengadilan Negeri Mungkid dengan inovasi “Aksebiitas Pengguna Difabel pada *Website*”;
5. Pengadilan Negeri Bontang dengan inovasi “Pelayanan Informasi Interaktif Melalui Radio”;
6. Pengadilan Negeri Yogya dengan inovasi “Pelayanan kesehatan dan Ruang pengasuhan Anak”.

Pemenang juara 2 diraih oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan inovasi “Menghitung sendiri biaya panjar perkara online.”

B. Visi Dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

“Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung”

Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dirumuskan dalam rangka mencapai visinya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan professional di bidangnya;
2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

C. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum masih mengacu pada renstra periode sebelumnya karena menunggu Rencana Strategis Mahkamah Agung periode 2015-2019 yaitu:

1. Peningkatan Tertib Administrasi meliputi:

- 1.1. Kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pidana, Peninjauan Kembali dan Grasi meliputi:
 - a. Standarisasi kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pidana, Peninjauan Kembali dan Grasi;
 - b. Menyusun pola formasi Pegawai Tenaga Teknis Peradilan;
 - c. Evaluasi dan Monitoring.
- 1.2. Laporan Perkara yang tepat waktu meliputi:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas pengadilan;
 - b. Inventarisasi Laporan Perkara;
 - c. Standarisasi Penyampaian Laporan.
- 1.3. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. Pembentukan Pengadilan;
 - b. Peningkatan Kelas;
 - c. Penyedia toga, laken hijau, palu hakim, register dan lain-lain.
- 1.4. Pengembangan model Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi:
 - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) manajemen perkantoran;
 - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Laporan Perkara;
 - c. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tenaga Teknis Peradilan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan aparaturnya yang profesional, dengan cara:
 - 2.1. Peningkatan kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Umum melalui penyelenggaraan Bimbingan Kerja, yang bersifat teknis (Standarisasi kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali, kejurusitaan) dan bersifat administratif (Pembekalan administrasi umum bagi Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Panitera) untuk membentuk aparaturnya yang profesional, serta mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan;
 - 2.2. Memberikan *reward* bagi Tenaga Teknis Peradilan Umum yang berprestasi dan *punishment* bagi yang menyalahi aturan organisasi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan umum. Disamping tugas pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan peradilan umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan disemua lingkungan peradilan umum;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dibantu oleh lima (5) unit eselon II terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum, dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan promosi dan mutasi Hakim;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

3. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi Peradilan Umum. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata kelola pengadilan;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan serta monitoring dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasikeadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

4. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tatalaksana perkara perdata.

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali perdata;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali perdata khusus;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

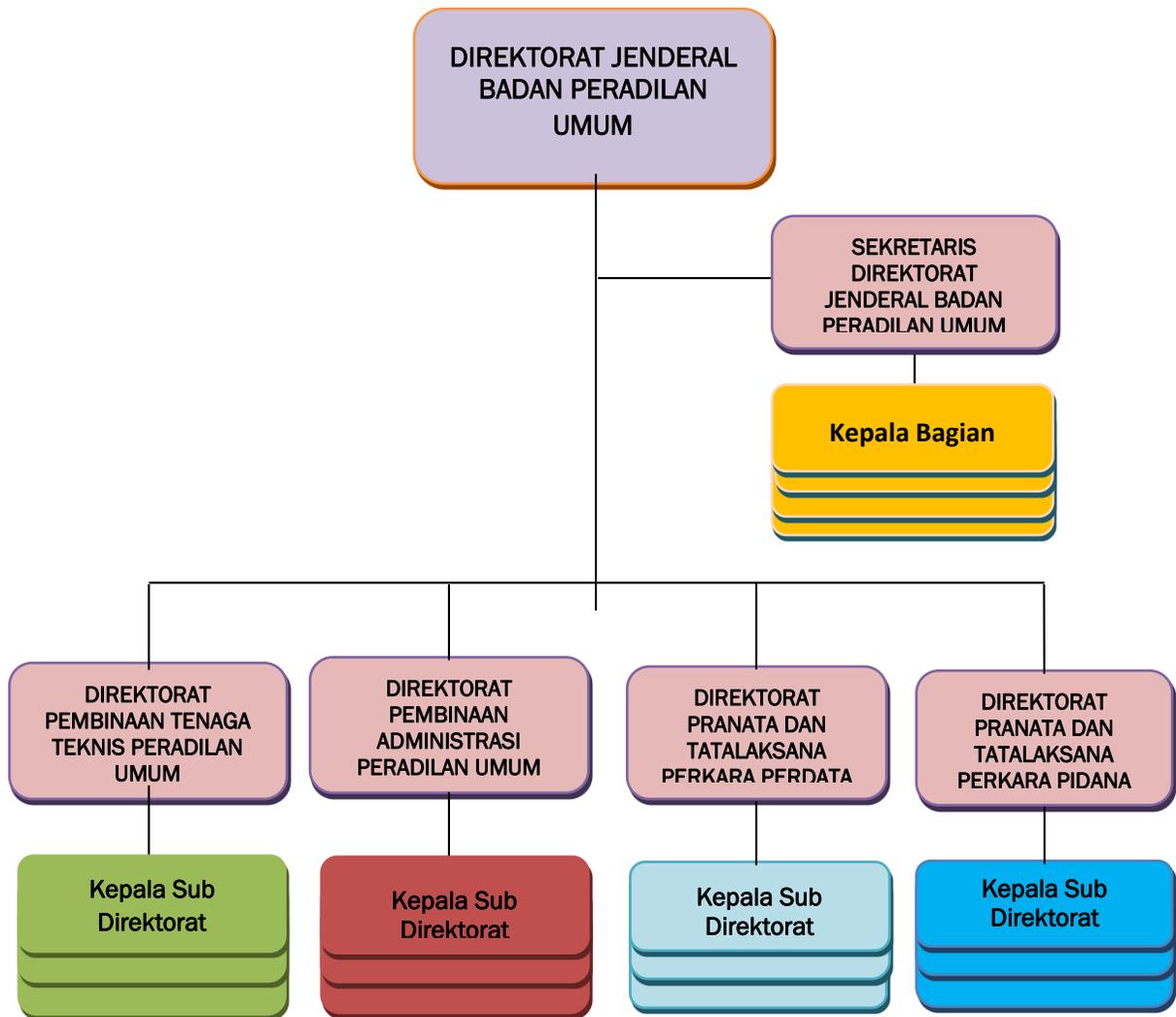
5. Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang pranata dan tatalaksana perkara pidana.

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana umum;
- b. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana khusus;
- c. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali dan grasi;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan:

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/II/2008 Tanggal 26 November 2008 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 113/DJU/SK/OT.01.3/XII/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan mahkamah Agung RI Format yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Sebagaimana tahun sebelumnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 Tentang Sasaran Kinerja Individu Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Fit And Proper Test Tahun Anggaran 2015
 - Fit and proper test dan profil assessment calon ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus atau IA diadakan di gedung Sekretariat MA RI, Jakarta pada tanggal 19 s/d 21 Mei 2015, di ikuti oleh 51 orang Hakim Pengadilan Negeri, peserta yang dinyatakan lulus 15 orang.
 - Fit and Proper test dan profil assessment calon wakil ketua Pengadilan Tinggi diadakan di Gedung Sekretariat MA RI, Jakarta pada tanggal 19 s/d 21 Agustus 2015, di ikuti oleh 30 orang Hakim Tinggi, Peserta yang dinyatakan lulus 10 orang.
 - Profil Assesment Calon Sekretaris Bawas diadakan di Gedung Sekretariat MA RI, Jakarta pada tanggal 19 s/d 21 Agustus 2015, diikuti oleh 10 Peserta, Peserta yang dinyatakan lulus 3 orang.

2. Rapat Persiapan Pra Promosi Mutasi Hakim di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 maret 2015 dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2015 berupa kegiatan Rapat di Luar Jam Kantor (RDJK) di ruang rapat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Rapat Koordinasi dalam rangka penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI untuk periode 1 April 2015 khusus untuk kenaikan pangkat/golongan Pembina TK. I (IV/b). Jumlah Peserta kegiatan sebanyak 32 orang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 10 orang dari BKN, bertempat di Gedung Sekretariat MA RI, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 s/d 27 Februari 2015.
4. Kegiatan Fit and Proper Test Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan Pengadilan Negeri Klas IA. Jumlah Peserta kegiatan terdiri dari 10 orang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum bertempat di Gedung Sekretariat MA RI, pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015.
5. Pelaksanaan Kegiatan Fit and Proper Test Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan Pengadilan Negeri Klas IA Jumlah Peserta Kegiatan terdiri dari 13 orang. Pelaksanaan RDJK kegiatan Fit and Proper Test Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan Pengadilan Negeri Klas IA dilaksanakan di Gedung Sekretariat MA RI, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015.
6. Rapat Evaluasi Kegiatan Fit and Proper Test Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan Pengadilan Negeri Klas IA. Jumlah peserta kegiatan terdiri dari 12 orang. Pelaksanaan RDJK kegiatan dilaksanakan di Gedung Sekretariat MA RI, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015.
7. Rapat Koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum dan BKN dalam rangka penyelesaian kenaikan pangkat tenaga teknis peradilan umum yang diikuti 39 peserta, hari Rabu s/d Jum'at tanggal 25 s/d 27 Februari 2015, bertempat di Gedung Sekretariat MA RI.
8. Rapat Koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan BKN dalam rangka penyelesaian kenaikan pangkat tenaga teknis peradilan umum yang diikuti 41

peserta, hari Selasa s/d Kamis tanggal 25 s/d 27 Agustus 2015 bertempat di Gedung Sekretariat MA RI.

9. Kegiatan Pemanggilan Peserta Profile Assessment sejumlah 104 orang, Peserta terdiri dari 2 kelompok, Persiapan pada tanggal 20 Agustus 2015 s/d 1 Oktober 2015, dan Pelaksanaan dimulai tanggal 5 s/d 8 Oktober 2015, bertempat di Gedung Sekretariat MA RI.
10. Kegiatan Pemanggilan Peserta untuk mengikuti seleksi Calon Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan Pengadilan Negeri Klas IA T.A. 2015 pada tanggal 20 Agustus 2015 s/d 1 Oktober 2015 dan Pelaksanaan dimulai tanggal 5 s/d 8 Oktober 2015, bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.
11. Kegiatan Pemanggilan Pemanggilan Peserta Assessment sejumlah 104 orang peserta terdiri dari 2 kelompok. Kelompok I terdiri dari 52 orang peserta, melakukan Profile Assessment pada hari senin tanggal 5 s/d 7 oktober 2015, kelompok II terdiri dari 52 orang peserta dilaksanakan pada hari selasa tanggal 6 s/d 8 oktober 2015, bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.
12. Kegiatan Rapat Diluar Jam Kantor (RDJK) di Ruang Rapat Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Peserta rapat koordinasi persiapan Profile Assessment dihadiri oleh 17 orang.
13. Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Umum bagi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Peserta bimbingan teknis administrasi berjumlah 70 orang, bertempat di Hotel Asana Kawanua di Jakarta selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 28 s/d 30 September 2015.
14. Rapat diluar Jam kantor dengan materi tentang Analisis Pola Formasi Hakim berdasarkan volume perkara di Indonesia dihadiri oleh 25 orang.
15. Kegiatan Bimbingan teknis administrasi bagi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahun 2015 pada hari Senin s/d Rabu, Tanggal 28 September s/d 30 September 2015 di Hotel Asana Kawanua di Jakarta dan dihadiri oleh 70 Peserta.
16. Kegiatan Peserta Pembinaan Hakim Crash Program dalam implementasi dan penegakkan Hukum Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diikuti oleh 41 Peserta.

17. Kegiatan Pemutakhiran data SIMPEG tahun 2015 Tenaga Teknis Peradilan Umum. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum pada tanggal 17 Maret 2015 s/d 19 Maret 2015 bertempat di Gedung Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Ciawi Bogor, Jawa Barat. Diikuti 43 orang peserta dari 15 Pengadilan Tinggi dan 10 orang panitia dari masing-masing unit eselon III di Lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan juga undangan 2 orang narasumber.
18. Kegiatan Pengevaluasian data Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Tahun 2015 pada tanggal 2 April 2015 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, dihadiri peserta 22 orang, 11 orang dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sejabodetabek, 10 orang dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, 1 orang dari unit Sekretariat Badan Peradilan Umum.
19. Kegiatan Pengevaluasian data Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Tahun 2015 pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2015 bertempat di lantai 4 (Ruang rapat Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), dihadiri peserta sebanyak 22 orang, terdiri dari PT dan PN sejabodetabek, 10 orang dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, 1 orang dari unit Sekretariat Badan Peradilan Umum.
20. Laporan Triwulan PP 39 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan satuan kerja di daerah;
21. Penyusunan Laporan Tahunan 2014 dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
22. Penyiapan Bahan RKA-KL, SIMAK-BMN, SAI, E-Monev PP 39 dan DIPA 03;
23. Penyusunan Naskah Buku dan Register Dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2015 di PUSDIKLAT MA RI-Bogor dengan diikuti 20 (dua puluh) orang peserta yang terdiri dari :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	: 9 orang
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi	: 11 orang

Kegiatan ini bertujuan untuk :
 - Terwujudnya Register Perkara Pidana Anak hasil dari penyempurnaan
 - Untuk Pedoman pelaksanaan pengisian register pada pengadilan
 - Untuk mewujudkan disiplin beradministrasi pada pengadilan
 - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

24. Pembuatan Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Pada Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan

Dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juni 2015 di Diklat Mahkamah Agung, Mega Mendung-Bogor dengan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari :

- Ketua Pengadilan Negeri : 11 orang
- Panitera/ Sekretris : 5 orang
- Wapan PN : 2 orang
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum : 7 orang

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik bagi masyarakat dan dalam rangka penyeragaman meja informasi di lingkungan peradilan umum.

25. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Justice Collaborators

Dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2015 di Hotel Royal Padjajaran, Bogor dengan diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri dari :

- Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum : 4 orang
- Ketua pengadilan Tinggi : 8 orang
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi : 2 orang
- Hakim Tinggi : 10 orang
- Hakim Tinggi/Panitera Muda Pidanan Khusus MA : 2 orang
- Ketua Pengadilan Negeri : 10 orang
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri : 3 orang
- Hakim Pengadilan Negeri : 1 orang
- Panitia : 4 orang

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Memfasilitasi pertemuan pemahaman Justice Collaborators (JC) dan Wistle Blower (WB)
- Persamaan persepsi penerapan tentang Justice Collaborators (JC) dan Wistle Blower (WB)

26. Pembekalan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS Bagi Panitera dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 April 2015 di Diklat Mahkamah Agung,

Mega Mendung-Bogor dengan peserta sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dan panitia sebanyak 5 (lima) orang. Peserta terdiri dari Peserta pusat yaitu pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, peserta daerah sebanyak 30 (tiga puluh) orang yaitu Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi.

Pembekalan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan manajemen perkara, manajemen keuangan perkara serta kebijakan administrasi perkara pada pengadilan;
 - b. Terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang modern, efektif, efisien dan saling menunjang bagi internal pengadilan maupun pihak lain yang membutuhkan informasi perkara;
 - c. Memberikan kemudahan administrasi dalam :
 - Monitoring perkara dengan adanya pengingat (reminder) setiap tahapan proses perkara;
 - Cari temu (search & found) data perkara;
 - Pelaporan administrasi perkara untuk memperoleh gambaran kinerja pengelolaan perkara di pengadilan;
 - d. Mendorong terciptanya keseragaman pelaksanaan manajemen perkara secara tertib, teratur, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. Memberikan kepastian bagi publik dan aparat pelaksana tentang prosedur administrasi yang benar;
 - f. Menjamin terlaksananya proses perbaikan administrasi manajemen perkara di pengadilan.
27. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Peradilan Umum dilaksanakan pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebanyak 6 (enam) lokasi wilayah Pengadilan Tinggi yang terdiri dari masing-masing petugas sebanyak 2 (dua) orang. Lokasi yang dikunjungi antara lain :
- Pengadilan Tinggi Medan terdiri dari PT Medan
 - Pengadilan Tinggi Bandung terdiri dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Kuningan, Pengadilan Negeri Sumedang,

Pengadilan Negeri Majalengka, Pengadilan Negeri Garut, Pengadilan Negeri Tasik, Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Cibinong, dan Pengadilan Negeri Sukabumi, .

- Pengadilan Tinggi Semarang terdiri dari Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Brebes, Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Slawi, Pengadilan Negeri Pemalang, Pengadilan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Purbalingga, Pengadilan Negeri Banyumas, Pengadilan Negeri Banjarnegara, Pengadilan Negeri Wonosobo, Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Negeri Rembang, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Karang Anyar, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Wonogiri, dan Pengadilan Negeri Temanggung,
 - Pengadilan Tinggi Surabaya terdiri dari Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri kab. Kediri, Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Probolinggo, Pengadilan Negeri Kraksaan, Pengadilan Negeri Tuban, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Negeri Tenggalek, Pengadilan Negeri Madiun, Pengadilan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri Magetan, Pengadilan Negeri Bangkalan, Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Negeri Pamekasan, dan Pengadilan Negeri Sumenep.
 - Pengadilan Tinggi Mataram terdiri dari Pengadilan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Praya, dan Pengadilan Negeri Selong
 - Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terdiri dari Pengadilan Negeri Bangka Belitung
28. Evaluasi dalam rangka Pembentukan Pengadilan/Peresmian Pengadilan/ Peningkatan Klas Pengadilan:
- Peningkatan Klas Pengadilan Negeri sebanyak 6 (enam) lokasi yaitu :Pengadilan Negeri Kotabaru (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin), Pengadilan Negeri Gianyar (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar), Pengadilan Negeri Parepare

(Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar), Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan), Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Negeri Sigli (Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam), dan Pembentukan Pengadilan Negeri 4 (empat) lokasi Pengadilan Negeri Belopa (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar), Pengadilan Negeri Kaimana (wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon), Pengadilan Negeri Namlea dan Pengadilan Negeri Piru (wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon).

29. Layanan Hukum

a. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan untuk 50 lokasi dengan jumlah layanan penyelesaian perkara sebanyak 1.065 perkara, pengadilan tersebut yaitu : Pengadilan Negeri, yaitu: PN Banda Aceh, PN Lhoksukon, PN Medan, PN Rantau Prapat, PN Tarutung, PN Padang Sidempuan, PN Sibolga, PN Stabat, PN Lubuk Pakam, PN Mandailing Natal, PN Balige, PN. Lubuk Basung, PN Tanjung Pati, PN Muaro, PN Bengkalis, PN Rengat, PN. Tanjung Pinang, PN. Batu Raja, PN Lahat, PN. Sekayu, PN. Pangkalan Bun. PN Sungai Liat, PN. Jakarta Utara, PN. Bekasi, PN. Cibinong, PN. Cilacap, PN Amuntai, PN. Tahuna, PN. Luwuk, PN. Poso, PN. Sinjai, PN. Selayar, PN. Makale, PN. Pasar Wajo, PN Amlapura, PN. Mataram, PN. Raba Bima, PN. Sumbawa Besar, PN Selong, PN. Ambon, PN. Masohi, PN. Tual, PN. Saumlaki, PN. Ternate, PN. Tobelo, PN. Labuha, PN. Soasio, PN. Jayapura, PN. Nabire, PN. Manokwari.

b. Pembebasan Biaya Perkara

Direktorat Jenderal Peradilan Umum melaksanakan pembebasan biaya perkara untuk 256 Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara sebanyak 166 perkara.

c. Pos Pelayanan Hukum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan pos pelayanan hukum untuk 350 Pengadilan dengan jumlah layanan kepada 11.551 orang.

30. Mengumpulkan dan mengolah data statistik perkara perdata umum, perdata khusus, pidana umum, dan pidana khusus sebagai bahan penyusunan buku statistik perkara dan laporan tahunan 2015.

31. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan perkara perdata melalui aplikasi Komdanas sebagai bahan penyusunan pelaporan tahunan 2015.
32. Mengumpulkan data dokumentasi wilayah hukum dikirimkan melalui pos dan surat elektronik (email) sebagai bahan pembuatan data dokumentasi secara elektronik.
33. Melakukan pencarian data melalui internet tentang kelengkapan data dokumentasi wilayah hukum yang belum dikirimkan oleh Pengadilan.
34. Membuat format pelaporan dokumentasi wilayah hukum secara elektronik untuk Website Badilum.
35. Membuat Data Dokumentasi Wilayah Hukum melalui elektronik untuk tampilkan Website Badilum.
36. Mengirimkan surat himbauan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang belum mengirimkan data perkara perdata umum, perdata khusus, pidana umum, dan pidana khusus tahun 2014.
37. Mengirimkan surat permintaan data dokumentasi wilayah hukum kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang belum mengirimkan data dokumentasi wilayah hukum melalui surat elektronik (email).
38. Membuat dan Mengirimkan surat laporan per triwulan kepada Pengadilan Tinggi mengenai keadaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada setiap pengadilan negeri dibawah wilayah pengadilan tinggi masing masing.
39. Membuat dan Mengirimkan surat laporan per triwulan kepada Pengadilan Tinggi mengenai keadaan laporan keuangan perdata melalui aplikasi Komdanas pada setiap pengadilan negeri dibawah wilayah pengadilan tinggi masing masing.
40. Membuat dan Mengirimkan surat laporan per triwulan kepada Kepaniteraan mengenai keadaan laporan keuangan perdata melalui aplikasi Komdanas untuk setiap pengadilan negeri dibawah wilayah pengadilan tinggi masing masing.
41. Mengikuti Pengawasan dan Monitoring SIPP versi 3.0.0 sebanyak 6 (enam) kali yang dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal 20 s/d 22 Januari 2015 bertempat di Pengadilan Tinggi Gorontalo.
 - b. Tanggal 27 s/d 29 Januari 2015 bertempat di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
 - c. Tanggal 3 s/d 5 Februari 2015 bertempat di Pengadilan Tinggi Samarinda.
 - d. Tanggal 10 s/d 12 Februari 2015 bertempat di Pengadilan Tinggi Medan.

- e. Tanggal 19 s/d 21 Februari 2015 bertempat di Pengadilan Tinggi Denpasar.
 - f. Tanggal 23 s/d 25 Februari 2015 bertempat di Pengadilan Tinggi Mataram.
42. Menyelenggarakan sosialisasi Register Pidana Anak secara Elektronik pada SIPP sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal 28 Januari 2015 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - b. Tanggal 29 Januari 2015 bertempat di Pengadilan Negeri Bekasi.
 43. Mengikuti Roll Out SIPP versi 3.0.1 sebanyak 4 (empat) kali yang dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal 5 s/d 12 Juni 2015 bertempat di Hotel Sangrila - Surabaya.
 - b. Tanggal 3 s/d 7 Agustus 2015 bertempat di Hotel Hermes - Medan.
 - c. Tanggal 19 s/d 23 Oktober 2015 bertempat di Hotel Novotel - Manado.
 - d. Tanggal 19 s/d 23 Oktober 2015 bertempat di Hotel Swiss bell - Ambon.
 44. Mengikuti TOT SIPP versi 3.0.1 sebanyak 1 (satu) kali pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 8 Mei 2015 bertempat di Hotel Mercure – Surabaya
 45. Mengadakan Development perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SIPP sebanyak 4 (empat) kali yang dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal 29 April s/d 13 Juni 2015 bertempat di Hotel Ubud - Malang
 - b. Tanggal 9 Agustus s/d 9 September 2015 bertempat di Hotel Ubud - Malang
 - c. Tanggal 5 Oktober s/d 3 November 2015 bertempat di Hotel Ubud - Malang
 - d. Tanggal 24 November s/d 23 Desember 2015 bertempat di Hotel Ubud - Malang
 46. Mengikuti pembahasan tentang perbaikan fitur mediasi pada aplikasi SIPP yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 Oktober 2015 bertempat di Hotel Oria – Jakarta.
 47. Memenuhi undangan sebagai Narasumber mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diselenggarakan oleh :
 - a) Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang diklat kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 2015
 - b) UNDP dalam agenda TOT SIPP untuk Badan Pengawasan tanggal 3 s/d 5 Juni 2015 bertempat di Hotel Santika - Bogor dan tanggal 27 s/d 29 Juli 2015 bertempat di Hotel Amaris - Bogor.
 48. Mengikuti rapat Laporan Tahunan 2015 pada tanggal 18 s/d 19 November 2015 bertempat di Gedung Mahkamah Agung RI

49. Mencetak buku Statistik Perkara Pidana, Perdata, PHI untuk tahun 2016.
50. Mencetak formulir Statistik Perkara Pidana, Perdata, PHI untuk tahun 2016
51. Melaksanakan Pembekalan tentang penyusunan standar pelaporan dan penggunaan biaya perkara di pengadilan tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2015 bertempat di Hotel Kawanua Aerotel - Jakarta.
52. Mengikuti acara Pameran Kampung Hukum yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI bertempat di Jakarta Convention Center tanggal 17 Maret 2015.
53. Mengikuti acara Pameran Legal Expo yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bertempat di Gedung Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 s/d 27 Oktober 2015.
54. Menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengenai Tim Pengembangan Aplikasi SIPP di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
55. Melaksanakan penghapusan data perkara pada Aplikasi SIPP tingkat Mahkamah Agung RI sesuai dengan usulan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pengaju.
56. Mengikuti acara Pertemuan Forum Pemangku Kepentingan Identitas Hukum di Sumatera Utara tanggal 3 s/d 5 Juni 2015 bertempat di Hotel JW Marriot – Medan.
57. Mengikuti acara Pertemuan dalam rangka peningkatan kepemilikan akta kelahiran dikalangan anak yang diselenggarakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Kantor Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
58. Mengikuti acara Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tanggal 23 s/d 24 Oktober 2015 bertempat di Hotel Royal – Bogor.
59. Pembekalan Penyelenggaraan Bimbingan teknis pengendalian dan penanganan perkara perdata umum dan khusus terhadap Wapan yang diikuti oleh 76 partisipan terdiri dari 66 Wapan 4 Pamud perdata, 6 Koordinator MA dan dilaksan di bogor, dengan peserta Wapan wilayah PT Bandung (14 PN), PT Lampung (2 PN), PT Semarang (11 PN), PT Yogyakarta (2 PN), PT Surabaya (11 PN), PT Banjarmasin (5 PN), PT Pontianak (4 PN), PT Makassar (3 PN), PT Manado (2 PN), PT Denpasar (3 PN), PT Mataram (3

PN), PT Banten (4 PN), Jakarta Pusat (2 PN), Koordinator Perkara Perdata Mahkamah Agung RI (6).

60. Bimbingan Teknis pengadilan dan penanganan perkara perdata umum dan khusus, wapan dan Para Panmud sesuai jenis perkara Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi diantaranya : PN. Bandung PN Bale Bandung, PN. Purwakarta, PN. Sumedang, PN. Tasikmalaya, PN. Sukabumi, PN. Cirebon, PN Cianjur, PN. Sumber, PN Garut, PN Majalengka, PN. Ciamis, PN.Indramayu, PN. Subang, PN Manggala, PN. Sukadana,PN. Jakarta Timur, PN. Jakarta Utara, PN.Jakarta Selatan, PN. Jakarta Barat, PN. Jakarta Pusat, PN. Surakarta, PN. Kudus, PN. Purwodadi, PN. Rembang, PN. Boyolali, PN Slawi, PN. Seragen, PN. Kendal, PN. Magelang, PN. Salatiga, PN. Ungaran, PN. Bantul, PN. Wates, PN. Situbondo, PN. Jember, PN. Kepanjen, PN. Lumajang, PN. Lamongan, PN. Jombang, PN. Bangil, PN. Kraksaan, PN. Tuban, PN. Gresik, PN. Probolinggo, PN. Kandangan, PN. Martapura, PN. Barabai, PN. Amuntai, PN.Banjarmasin, PN. Pontianak, PN. Mempawah, PN. Singkawang, PN. Sanggau, PN. Pare-pare, PN. Barru, PN. Malili, PN. Tondano, PN. Amurang, PN. Amlapur, PN. Semarapura, PN. Tabanan, PN. Praya, PN. Dompu, PN. Sumbawa Besar, PN. Tangerang, PN. Serang, PN. Pandeglang, PN. Rangkas Bitung
61. Kegiatan berkas perkara perdata dilaksanakan ke 17 (Tujuh Belas) lokasi dengan mendatangi PN yang dituju adalah sebagai berikut; PN Pekanbaru, PN Pasir Pangaraian, PN Tondano, PN Amurang, PN Idi, PN Pelaihari, PN Kediri, PN Jember, PN Painan, PN Maros, PN Pare-pare, PN Tuban, PN Banjarmasin, PN Manna, PN Semarang, PN Kudus, PN Madiun
62. Sehingga diajukan Revisi sisa anggaran untuk dipergunakan kegiatan monitoring ke 7 PN sebagai berikut; PN Rangkasbitung, PN Pandeglang, PN Jepara, PN Kuningan, PN Cirebon, PN Brebes, PN Tegal
Dari hasil kegiatan Implementasi dan Monitoring ke Pengadilan Negeri tersebut diatas ditemukan pembendelan berkas bundel A dan B yang susunanya terbaik, tidak sesuai dengan Buku II dan pola Bimdalmin sehingga team Implementasi pusat (Pratalak Perdata) memberikan arahan sesuai aturan yang berlaku.
63. Pembekalan pemberkasan dan penanganan berkas perkara pidana terhadap para Panmud agar dapat memahami pelaksanaan pembekalan pemberkasan dan penelaahan

64. Bimbingan teknis pengendalian dan penanganan berkas perkara pidana kepada para panmud sesuai jenis perkara pengadilan negeri wilayah hukum pengadilan Tinggi diantaranya : PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, PN Depok, PN Cibadak, PN Bekasi, PN Cianjur, PN Sumedang, PN Tasikmalaya, PN Ciamis, PN Indramayu, PN Tanggerang, PN Serang, PN Rangkasbitung, PN Kendal, PN Batang, PN Salatiga.
65. Implementasi berkas pidana dilaksanakan ke 19 (Sembilan Belas) lokasi dan monitoring 7 (Tujuh) Lokasi dengan mendatangi PN yang dituju, dihadiri oleh para pimpinan / Staf yang berkompeten dalam pemberkasan dan diberi pengarahan oleh Tim Pranata dan Tatalaksana perkara pidana tentang berbagai permasalahan baik berupa kebijakan baru dari pimpinan maupun prihal lain sebagai faktor penghambat kelancaran berkas yang akan diselesaikan dalam berkas perkara.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

1.1. Data Hakim Seluruh Indonesia Tahun 2015

a. Data Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri per Gender dan Pendidikan Tahun 2015

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Pendidikan		
					S1	S2	S3
1.	Ketua Pengadilan Tinggi	22	4	26	4	15	7
2.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	25	2	27	6	19	2
3.	Hakim Pengadilan Tinggi	449	52	501	187	298	16
4.	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I.	11	3	14	1	10	3
5.	Hakim Tinggi Yustisial Was M.A.R.I.	21	5	26	12	14	-
6.	Hakim Tinggi Yustisial Pengadilan Tinggi	7	-	7	5	2	-
7.	Hakim Yustisial M.A.R.I.	30	28	58	9	45	4
8.	Hakim Yustisial Bawas	2	2	4	1	3	-
9.	Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi	19	7	26	18	8	-
10.	Hakim Non Palu PT	15	1	16	11	5	-
11.	Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus	13	2	15	-	11	4
12.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IAKhusus	11	3	14	-	12	2
13.	Hakim Pengadilan Negeri Klas IAKhusus	398	82	480	147	326	7
14.	Ketua Pengadilan Negeri Klas IA	24	-	24	4	18	2
15.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA	18	5	23	3	20	-

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Pendidikan		
					S1	S2	S3
16.	Hakim Pengadilan Negeri Klas IA	225	90	315	122	192	1
17.	Ketua Pengadilan Negeri Klas IB	56	6	62	12	46	4
18.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB	62	6	68	13	54	1
19.	Hakim Pengadilan Negeri Klas IB	426	222	648	365	280	3
20.	Ketua Pengadilan Negeri Klas II	190	33	223	89	133	1
21.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II	180	43	223	79	142	2
22.	Hakim Pengadilan Negeri Klas II	794	408	1.202	803	395	4
Jumlah		2.998	1.004	4.002	861	2.406	91

b. Jumlah Kenaikan Pangkat Hakim untuk Periode April dan Periode Oktober 2015 sebanyak 1020 orang terdiri dari :

-	Periode April 2015	742	Orang
-	Periode Oktober 2015	111	Orang

c. Daftar Mutasi dan Promosi Hakim Tahun 2015

- Hakim Tingkat Pertama :

-	Ketua Pengadilan Negeri	:	219	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	:	249	Orang
-	Hakim Pengadilan Negeri	:	968	Orang
-	Hakim Yustisial MA RI	:	10	Orang
-	Hakim Sektim Bawas	:	4	Orang
-	Hakim Yustisial PT	:	17	Orang
-	Hakim Non Palu	:	2	Orang
	Jumlah	:	1.469	Orang

- Hakim Tingkat Banding :

-	Ketua Pengadilan Tinggi	:	1	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	:	2	Orang
-	Hakim Pengadilan Tinggi	:	191	Orang
-	Hakim Tinggi Yustisial MA RI	:	1	Orang
-	Hakim Tinggi Yust Bawas	:	3	Orang
-	Hakim Tinggi Yustisial PT	:	5	Orang
	Jumlah	:	203	Orang

- Mutasi dan Penempatan calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Jumlah	:	62	Orang
--------	---	----	-------

Jumlah Mutasi Hakim Keseluruhan adalah 1.734 Orang

- d. Daftar Hukuman Disiplin Hakim Tahun 2015

-	Hakim Tingkat Pertama	:	51	Orang
-	Hakim Tingkat Banding	:	6	Orang
-	Hakim Ad Hoc	:	4	Orang
	Jumlah	:	61	Orang

- e. Daftar Hakim yang Pensiun, diberhentikan dan Meninggal Dunia Tahun 2015

Uraian	Pensiun	Diberhentikan	Wafat
Hakim Tingkat Pertama	2	4	6
Hakim Tingkat Banding	16	-	5
Jumlah	18	4	11

- f. Data Hakim Karir dan Ad Hoc, Tipikor, Niaga, Perikanan, PHI dan Anak sampai dengan Desember 2015.

NO	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Hakim Tipikor Tingkat Pertama	180	32	212
2.	Hakim Tipikor Tingkat Banding	165	18	183
3.	Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama	112	17	129
4.	Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding	59	10	69

NO	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5.	Hakim Tipikor Tingkat Kasasi	5	-	5
6.	Hakim Niaga	39	3	42
7.	Hakim PHI	123	14	137
8.	Hakim Ad Hoc PHI	143	14	157
9.	Hakim AD Hoc PHI Tingkat Kasasi	7	-	7
10.	Hakim Perikanan	30	2	32
11.	Hakim Ad Hoc Perikanan	53	3	56
12.	Hakim Anak Tingkat Pertama	1.312	562	1.874
13.	Hakim Anak Tingkat Banding	134	24	158
14.	Hakim Pemilu Tingkat Pertama	1.597	553	2.150
15.	Hakim Pemilu Tingkat Banding	247	22	269
16.	Hakim Lingkungan Tingkat Pertama	98	18	116
17.	Hakim Lingkungan Tingkat Banding	38	2	40
Jumlah		4.342	1.294	3.061

- Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Hakim Niaga, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim Ad Hoc PHI serta Hakim Perikanan dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai berikut :

-	Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi	:	158	Orang
-	Hakim Anak pada Pengadilan Negeri	:	1874	Orang
-	Hakim Niaga	:	42	Orang
-	Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	:	137	Orang
-	Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial	:	157	Orang
-	Hakim Perikanan Pengadilan Negeri	:	32	Orang
-	Hakim Adhoc Pengadilan Perikanan	:	56	Orang
-	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	:	395	Orang
-	Hakim Adhoc Tipikor	:	203	Orang

1.2. Data Kepaniteraan Seluruh Indonesia Tahun 2015

a. Data Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

NO	JABATAN	PT	PN IA KHUSUS	PN IA	PN IB	PN II	JUMLAH
1	Panitera Sekretaris	30	15	24	78	232	379
2	Wakil Panitera	30	15	23	73	206	347
3	Panitera Muda Pidana	29	15	24	73	211	352
4	Panitera Muda Perdata	28	15	24	74	204	345
5	Panitera Muda Hukum	30	15	24	74	200	343
6	Panitera Pengganti	525	642	458	1002	1555	4182
7	Jurusita	0	93	106	225	357	781
Jumlah							6.729

b. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri untuk Periode April 2015 sebanyak 429 Orang, Periode Oktober 2015 sebanyak 366 Orang.

c. Dalam Pelaksanaan Hukuman Disiplin terhadap Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang bermasalah terhadap hukuman disiplin berat sebanyak 13 orang, hukuman disiplin sedang sebanyak 7 orang, hukuman disiplin ringan sebanyak 40 orang, jumlah keseluruhan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang pensiun sebanyak 129 orang. Untuk yang meninggal dunia jumlah keseluruhannya sebanyak 38 orang.

c. Daftar Mutasi Kepaniteraan Tahun 2015

- Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2015

Panitera Sekretaris	:	108	Orang
Wakil Panitera	:	78	Orang
Panitera Muda Pidana	:	96	Orang
Panitera Muda Perdata	:	89	Orang
Panitera Muda Hukum	:	117	Orang

Panitera Pengganti	:	609	Orang
Jurusita	:	33	Orang
Jumlah	:	1107	Orang

- Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2015

Panitera Sekretaris	:	9	Orang
Wakil Panitera	:	8	Orang
Panitera Muda Pidana	:	6	Orang
Panitera Muda Perdata	:	11	Orang
Panitera Muda Hukum	:	9	Orang
Panitera Pengganti	:	54	Orang
Jumlah	:	98	Orang

d. Daftar Rekapitulasi Pensiun Kepaniteraan Tahun 2015

No	Jabatan	Pengadilan Tinggi		Jumlah Pensiun PT	Pengadilan Negeri		Jumlah Pensiun PN	Jumlah Total
		L	P	0	L	P	0	
1.	Panses	2	0	2	6	0	6	8
2.	Panmud Hukum	0	0	0	4	2	6	6
3.	Panmud Perdata	0	0	0	4	1	5	5
4.	Panmud Pidana	0	0	0	6	3	9	9
5.	Panitera Pengganti	4	1	5	71	30	101	106
6.	Wapan	0	0	0	6	2	8	8
7.	Jurusita	0	0	0	6	0	6	6
Jumlah		6	1	7	103	38	141	148

e. Daftar Rekapitulasi Wafat Kepaniteraan Tahun 2015

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Panitera Pengadilan Negeri	5
2.	Panitera Pengadilan Tinggi	1
3.	Panmud Hukum PN	2
4.	Panmud Perdata PT	1

NO	JABATAN	JUMLAH
5.	Panmud Pidana PN	3
6.	Panmud Pidana PT	1
7.	Panitera Pengganti PN	16
8.	Panitera Pengganti PT	4
9.	Wapan PN	1
10.	Wapan PT	1
11.	Jurusita PN	3
12.	Jurusita Pengganti PN	4
	Jumlah	42

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 180 (seratus delapan puluh orang) orang dengan sebaran jabatan sebagai berikut:

Dipimpin oleh satu orang eselon I yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan dibantu oleh 5 eselon II terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum satu orang; Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (kosong); Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum satu orang; Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata satu orang; Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana satu orang; 16 orang eselon III (4 kepala Bagian dan 12 Kepala Sub Direktorat), 1 Jabatan kosong eselon III pada Subdit Peninjauan Kembali Perdata; 51 orang eselon IV (12 Kepala Sub Bagian dan 39 Kepala Seksi); 4 orang tenaga fungsional serta 95 orang staf dan 8 orang cpns.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan pangkat yang dapat kita lihat dalam tabel berikut yaitu:

a. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Golongan	Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Pendidikan														Ket
		L	P		S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IV	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	3	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	4	7	11	-	-	3	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a	7	5	12	-	-	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	d	26	8	34	-	-	6	2	20	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	c	8	12	20	-	-	3	4	4	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	b	33	29	62	-	-	2	5	15	9	-	-	16	15	-	-	-	-	1 Hakim Yustisial
	a	10	12	22	-	-	1	-	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	d	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	c	5	4	9	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		97	83	180	1	-	23	19	51	39	3	8	18	17	1	-	-	-	-
Jumlah Total					180														

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2015 sebanyak 180 orang yang terdiri dari :

No	Unit	Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Fungsional	Hakim Yustisial	Staf	CPNS	Jumlah	Keterangan
1.	Pimpinan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	-	1	4	12	4	1	32	2	55	1 Hakim Yustisial
3.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	-	1	3	9	-	-	13	1	27	-
4.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	-	-	4	13	-	-	27	4	48	-
5.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	-	1	2	7	-	-	18	1	29	1 Jabatan Kosong Es III (Subdit PK Perdata)
6.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	-	1	3	10	-	-	6	-	20	-
Jumlah		1	4	16	51	4	1	95	8	180	-

Keterangan :Es : Eselon CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

c. Diklat/Pelatihan/Bimtek Tahun 2015

No	Diklat	Pelatihan	Ujian dinas	Keterangan
1.	Kewirausahaan Agri Bisnis	-		Diikuti 6 Orang Peserta Risa Silvia Tony Curtis S, SH Widodo, SH Suwarni Retnowati Tugino
2.	-	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		Diikuti oleh 1 Orang Peserta Kurnia Arry Soelaksono, SE, SH, MM
3.	-	Training of Trainer		Diikuti oleh 2 Orang Peserta Indra Kurniawan, SE, MM Fendi Priatama, SH
4.	-	Sistem Pelelangan secara elektronik versi terbaru		Diikuti oleh 3 Orang Peserta Agus Sulisty, SH,MM Rudi Pramudiyanto, ST Indra Kurniawan, SE, MM
5.	Diklat Pimpinan Tingkat III	-		Diikuti oleh 2 Orang Peserta Andri Tistianto Sutrisna, SH, MH Junaedi Kamaludin, SE, M.Si
6.		Petugas upacara		Diikuti 1 Orang Peserta Sri Pamungkas, SH
7.		Training Chanter Building		Diikuti 3 Orang Peserta Ahmad Hakir, SH, MH Lies Khadijah, SH, MH H. Maliki, SH
8.			Ujian Dinas TK. II	Diikuti 2 Orang Peserta Fera Ferianti, A.Md

No	Diklat	Pelatihan	Ujian dinas	Keterangan
				Marthinalova Noll, A.Md
9.		Akreditasi Peningkatan Mutu Peradilan Umum		Diikuti Oleh 33 Orang Peserta
10.		Aplikasi SAIBA		Diikuti Oleh 4 Orang Peserta Puji Mulyani, SE Dedi Supriadi, SH Muamar Sadam, SH Ati Apriyani, S.Si
11.		Mengikuti Penyusunan Laporan Keuangan/BMN Satker Daerah Semester II		Diikuti Oleh 18 orang Peserta
12.		Mengikuti Sosialisasi Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)		Diikuti 4 Orang Peserta Kurnia Arry Soelaksono, SE, SH Agus Supriyatno, SE Nopinus Andereas Purba, SE Ratna Sari, SH
13.		Mengikuti Sosialisasi Aplikasi LPSE Versi 4.0 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Diikuti 3 Orang Peserta Agus Sulisty, SE, MH Rudi Pramudiyanto, ST Indra Kurniawan, SE, MM
14.		Mengikuti Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akrual Tahunan Tingkat Instansi T.A. 2015 di KPPN Jakarta VI		Diikuti 2 Orang Peserta Puji Mulyani, SE Ati Apriyani, S.Si
15.		Mengikuti Training ISO 9001=2008 Subdit Mutasi Hakim dan Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita		Diikuti Oleh 26 Orang Peserta
16.		Mengikuti Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akrual Tahun TK Instansi TA 2015		Diikuti Oleh 2 Orang Peserta Puji Mulyani, SE Ati Apriyani, S.Si
17.		Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan/Badan Milik Negara (BMN)		Diikuti Oleh 10 Orang Peserta

No	Diklat	Pelatihan	Ujian dinas	Keterangan
18.		Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Administrasi Peradilan Umum		Diikuti Oleh 2 Orang Peserta
19.		Mengikuti Assesment Pegawai Di Diklat Kementerian Kesehatan		Diikuti Oleh 1 Orang Peserta Estu Putri Rahayu, SH
20.		Mengikuti Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP)		Diikuti Oleh 2 Orang Peserta Agus Sulistyono, SE, MH Rudi Pramudiyanto, ST

3. Rekrutmen

Rekrutmen Calon Hakim yang dahulu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejak satu atap dengan Mahkamah Agung RI Tahun 2004 tidak lagi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, akan tetapi dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan Rekrutmen yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya terhadap Honorer yaitu untuk Pengemudi sebanyak 10 orang dan Pramubakti sebanyak 36 orang, jumlah seluruhnya sebanyak 46 orang.

4. Mutasi

Dalam rangka penyegaran dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan mutasi terhadap pejabat eselon IV dan Staf dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

5. Pensiun

Tahun 2015 satu orang pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memasuki Purna Bakti yaitu Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dr. H. RM. Anton Sujatno, SH., M.Hum pada tanggal 1 Juni 2015 dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak ada yang memasuki usia pensiun karena adanya peraturan baru tentang penambahan usia yang diatur dalam Pasal 4 point c Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.

B. Keadaan Perkara

1. Jumlah Pengadilan

1.1. Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia berjumlah 352 pengadilan yang tersebar di 30 wilayah Hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana berikut :

No.	Pengadilan Tinggi	Pengadilan Negeri				Jumlah PN
		Klas IA Khusus	Klas IA	Klas IB	Klas II	
1.	N.A. Darussalam	-	1	-	17	18
2.	Medan	1	-	-	13	14
3.	Padang	-	1	-	12	13
4.	Pekanbaru	-	3	1	10	14
5.	Jambi	-	1	1	8	10
6.	Palembang	1	-	1	7	9
7.	Bengkulu	-	1	1	6	8
8.	Tanjung Karang	-	1	1	8	10
9.	Jakarta	5	-	-	-	5
10.	Bandung	2	1	12	6	21
11.	Semarang	2	-	13	20	35
12.	Jogjakarta	-	1	1	3	5
13.	Surabaya	2	-	14	19	35
14.	Banjarmasin	-	1	1	10	12
15.	Palangkaraya	-	1	1	6	8
16.	Pontianak	-	1	1	8	10
17.	Samarinda	-	2	2	8	12
18.	Makassar	1	-	7	18	26
19.	Kendari	-	1	1	5	7
20.	Palu	-	1	1	5	7
21.	Manado	-	1	2	4	7
22.	Denpasar	-	1	1	6	8
23.	Mataram	-	1	2	3	6
24.	Kupang	-	1	1	14	16
25.	Ambon	-	1	-	4	5
26.	Jayapura	-	1	1	8	10

No.	Pengadilan Tinggi	Pengadilan Negeri				Jumlah PN
		Klas IA Khusus	Klas IA	Klas IB	Klas II	
27.	Maluku Utara	-	-	1	3	4
28.	Banten	1	1	-	2	4
29.	Bangkabelitung	-	-	2	1	3
30.	Gorontalo	-	-	2	2	4
JUMLAH		15	24	78	235	352

1.2. Jumlah Pengadilan Tingkat Banding

1.	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi A	:	11	Pengadilan
2.	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi B	:	19	Pengadilan

1.3. Jumlah Pengadilan Khusus di Indonesia:

1.	Pengadilan Khusus Peradilan Anak	:	350	Pengadilan
2.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	:	30	Pengadilan
3.	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	:	34	Pengadilan
4.	Pengadilan Niaga	:	5	Pengadilan
5.	Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)	:	4	Pengadilan
6.	Pengadilan Perikanan	:	7	Pengadilan

2. Data Perkara Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Perkara Perdata

1. Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2015.

Gugatan

Sisa Perkara Tahun 2014	:	10.905	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	28.403	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	23.245	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2015	:	3.723	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	12.340	Perkara
Banding	:	5.417	Perkara
Kasasi	:	3.071	Perkara
Peninjauan Kembali	:	243	Perkara

Permohonan

Sisa Perkara Tahun 2014	:	1.213	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	31.554	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	28.367	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2015	:	2.315	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	2.085	Perkara
Banding	:	0	Perkara
Kasasi	:	16	Perkara
Peninjauan Kembali	:	1	Perkara

Berdasarkan data diatas, untuk Gugatan : tahun 2015 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 28.403 perkara, di mana sisa tahun 2014 sebanyak 10.905 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 39.308 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan di cabut sebanyak 3.723 dan berhasil di putus 23.245 perkara, sehingga sisa perkara di Tahun 2015 sebanyak 12.340, kasasi sebanyak 3.071 perkara, banding sebanyak 5.417 perkara dan peninjauan kembali sebanyak 243 perkara,

Untuk permohonan : tahun 2015 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh indonesia berjumlah 31.554 perkara, di mana sisa tahun 2014 sebanyak 1.213 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 32.767 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan berhasil di putus 28.367 perkara, kasasi sebanyak 16 perkara, banding sebanyak 0 perkara dan peninjauan kembali 1 perkara.

1.1. Statistik Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi Bulan Januari s/d Desember 2015

NO	Nama Pengadilan	Gugatan							
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	169	292	225	225	195	126	119	1
2	Pengadilan Tinggi Medan	789	1767	1490	219	847	402	191	29
3	Pengadilan Tinggi Padang	236	478	367	84	263	176	158	13
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	367	952	794	120	405	186	161	5
5	Pengadilan Tinggi Jambi	107	248	219	46	90	101	30	8
6	Pengadilan Tinggi Palembang	157	392	342	48	159	110	61	11
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	35	76	62	13	36	33	30	0
8	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	130	330	276	63	121	33	20	1
9	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	58	167	160	16	49	30	20	1
10	Pengadilan Tinggi Jakarta	1633	3323	2524	469	1962	596	316	22
11	Pengadilan Tinggi Bandung	1138	2824	2199	429	1334	482	256	31
12	Pengadilan Tinggi Semarang	899	2701	2267	412	921	551	246	9
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	229	483	450	74	188	98	17	3
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	1419	3460	2844	477	1558	702	398	39
15	Pengadilan Tinggi Banten	358	957	703	143	469	108	62	5
16	Pengadilan Tinggi Denpasar	499	2443	2132	199	611	204	190	13

NO	Nama Pengadilan	Gugatan							
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
17	Pengadilan Tinggi Mataram	236	603	476	117	246	181	111	6
18	Pengadilan Tinggi Kupang	243	585	540	68	220	186	124	4
19	Pengadilan Tinggi Pontianak	136	384	306	61	153	93	56	2
20	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	144	439	121	40	122	90	50	5
21	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	137	531	465	54	149	83	36	1
22	Pengadilan Tinggi Samarinda	285	556	389	92	360	104	82	4
23	Pengadilan Tinggi Manado	438	1616	1370	113	571	171	70	11
24	Pengadilan Tinggi Palu	138	349	309	32	146	68	38	2
25	Pengadilan Tinggi Makassar	490	1111	859	119	623	266	126	10
26	Pengadilan Tinggi Kendari	92	226	168	39	111	77	60	2
27	Pengadilan Tinggi Gorontalo	35	112	85	21	41	24	16	0
28	Pengadilan Tinggi Ambon	99	367	282	43	141	36	23	1
29	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	35	135	117	21	32	19	20	0
30	Pengadilan Tinggi Jayapura	175	496	404	50	517	81	44	4
Total		10.905	28.403	23.245	3.723	12.340	5.417	3.017	243

1.2. Statistik Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi Bulan Januari s/d Desember 2015

NO	Nama Pengadilan	Permohonan							
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir	Bandung	Kasasi	PK
1.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	20	1.036	918	34	104	0	0	0
2	Pengadilan Tinggi Medan	47	1.055	979	58	65	0	1	0
3	Pengadilan Tinggi Padang	45	742	701	31	55	0	0	0
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	37	1.066	971	54	78	0	0	0
5	Pengadilan Tinggi Jambi	3	288	261	16	14	0	0	0
6	Pengadilan Tinggi Palembang	8	417	366	16	43	0	1	0
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	1	145	131	4	11	0	0	0
8	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	9	201	167	29	14	0	0	0
9	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	4	125	124	0	5	0	0	0
10	Pengadilan Tinggi Jakarta	191	2.424	2.078	302	275	0	2	0
11	Pengadilan Tinggi Bandung	185	3.333	3.009	312	197	0	2	0
12	Pengadilan Tinggi Semarang	143	4.234	3.851	364	222	0	4	0
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	24	654	678	66	34	0	0	0
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	221	5.494	4.971	381	363	0	0	0
15	Pengadilan Tinggi Banten	56	903	754	107	98	0	2	0
16	Pengadilan Tinggi Denpasar	47	1.133	1.012	101	67	0	1	0
17	Pengadilan Tinggi Mataram	17	481	436	31	31	0	1	0

NO	Nama Pengadilan	Permohonan							
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir	Bandung	Kasasi	PK
18	Pengadilan Tinggi Kupang	7	1.441	1.377	43	28	0	0	0
19	Pengadilan Tinggi Pontianak	15	631	543	46	57	0	1	0
20	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	12	284	262	19	15	0	0	0
21	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	8	544	504	24	24	0	0	0
22	Pengadilan Tinggi Samarinda	30	1.129	1.017	59	83	0	0	0
23	Pengadilan Tinggi Manado	25	719	625	56	63	0	1	1
24	Pengadilan Tinggi Palu	6	198	177	13	14	0	0	0
25	Pengadilan Tinggi Makassar	23	1.472	1.333	74	88	0	0	0
26	Pengadilan Tinggi Kendari	11	301	265	22	25	0	0	0
27	Pengadilan Tinggi Gorontalo	2	207	188	15	6	0	0	0
28	Pengadilan Tinggi Ambon	5	129	121	9	4	0	0	0
29	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	4	113	110	6	1	0	0	0
30	Pengadilan Tinggi Jayapura	7	595	538	23	41	0	0	0
Total		1.213	31.554	28.367	2.315	2.085	0	16	1

2. Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2015.

Sisa Perkara Tahun 2014	:	1.236	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	5.714	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	5.297	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2015	:	24	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	1.629	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2015 perkara yang diterima pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 5.714 perkara, di mana sisa tahun 2014 sebanyak 1.236 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 6.950 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan di cabut sebanyak 24 perkara dan berhasil di putus 5.297 perkara sehingga akhir tahun 2015 sisa perkara yang menjadi tunggakan sebanyak 1.629 perkara.

b. Perkara Pidana

1. Jumlah Perkara Pidana Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2015

Pidana Biasa

Sisa Perkara Tahun 2014	:	20.5120	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	129.082	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	123.114	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2015	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	24.224	Perkara
Banding	:	4.930	Perkara
Kasasi	:	2.602	Perkara
Peninjauan Kembali	:	85	Perkara

Pidana Singkat

Sisa Perkara Tahun 2014	:	8	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	407	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	399	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2015	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	16	Perkara
Banding	:	10	Perkara
Kasasi	:	5	Perkara
Peninjauan Kembali	:	0	Perkara

Pidana Cepat

Sisa Perkara Tahun 2014	:	15	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	13.615	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	13.566	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2015	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	64	Perkara
Banding	:	60	Perkara
Kasasi	:	1	Perkara
Peninjauan Kembali	:	1	Perkara

Pidana Khusus

Sisa Perkara Tahun 2014	:	869	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	2.456	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	2.249	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2015	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	1.076	Perkara
Banding	:	635	Perkara
Kasasi	:	331	Perkara
Peninjauan Kembali	:	3	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2015 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia Perkara Pidana Biasa berjumlah 129.082 perkara, di mana sisa tahun 2014 sebanyak 20.512 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 149.594 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 123.114 perkara sehingga sisa perkara di tahun 2015 sebanyak 24.224 perkara, Pidana singkat berjumlah 407 perkara, dimana sisa tahun 2014 sebanyak 8 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 415 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 399 perkara sehingga sisa ditahun 2015 sebanyak 16 Perkara, Pidana Cepat berjumlah 13.615 perkara, di mana sisa tahun 2014 adalah 15 perkara, perkara yang diputus berjumlah 13.566 perkara, maka sisa perkara tahun 2015 adalah 64 perkara, dan Perkara Pidana Khusus berjumlah 2.456 perkara, dimana sisa tahun 2014 sebanyak 869 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 3.325 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 2.249 perkara sehingga sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1.076 perkara.

2. Jumlah Perkara Pidana Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2014

Sisa Perkara Tahun 2014	:	692	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2015	:	5.216	Perkara
Perkara Putus Tahun 2015	:	4.896	Perkara
Cabut		9	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2015	:	999	Perkara

Jumlah penerimaan perkara Pidana Banding seluruh Indonesia tahun 2015 sebanyak 5.216 perkara, di mana sisa tahun 2014 sebanyak 692 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 5.908 perkara dan berhasil di putus sebanyak 4.896 perkara, sehingga akhir tahun 2015 sisa perkara sebanyak 999 perkara.

2.1. Statistik Perkara Pidana Umum Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

No	Nama Pengadilan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio	Sisa Akhir	Bandung	Kasasi	PK	Eksekusi	PK
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	563	3.746	3.337	89%	971	186	93	1	0	0
2	Pengadilan Tinggi Medan	2.933	15.206	15.084	99%	3.055	759	443	9	0	0
3	Pengadilan Tinggi Padang	335	2.748	2.636	96%	447	198	90	1	0	0
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	1.215	8.157	7.701	94%	1.671	269	119	6	0	0
5	Pengadilan Tinggi Jambi	279	2.354	2.120	90%	513	92	57	2	0	7
6	Pengadilan Tinggi Palembang	955	6.590	6.480	98%	1.065	145	80	2	0	0
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	185	1.355	1.324	98%	216	59	33	2	0	0
8	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	666	4.349	4.222	97%	793	55	31	2	0	0
9	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	189	1.381	1.360	98%	210	27	11	0	0	0
10	Pengadilan Tinggi Jakarta	1.743	8.776	8.233	94%	2.285	220	71	9	0	0
11	Pengadilan Tinggi Bandung	1.865	12.754	12.487	98%	2.132	258	129	3	0	0
12	Pengadilan Tinggi Semarang	1.316	13.115	13.161	100%	1.270	334	131	5	0	0
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	213	1.816	1.861	102%	168	105	55	1	0	2
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	2.522	20.979	20.612	98%	2.889	681	432	18	0	3
15	Pengadilan Tinggi Banten	667	3.680	3.352	91%	995	161	78	2	0	0

No	Nama Pengadilan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Ratio	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	PK
16	Pengadilan Tinggi Denpasar	215	2.314	2.187	95%	342	46	41	2	0	0
17	Pengadilan Tinggi Mataram	224	2.035	1.921	94%	338	79	42	1	0	0
18	Pengadilan Tinggi Kupang	256	2.137	2.124	99%	269	156	81	1	0	0
19	Pengadilan Tinggi Pontianak	428	3.336	3.042	91%	722	82	41	0	0	0
20	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	293	2.429	2.358	97%	364	80	25	1	0	0
21	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	631	5.560	5.301	95%	890	83	52	1	0	0
22	Pengadilan Tinggi Samarinda	627	4.179	3.710	89%	1.096	106	69	2	0	0
23	Pengadilan Tinggi Manado	328	1.803	1.684	93%	447	71	42	0	0	0
24	Pengadilan Tinggi Palu	310	1.800	1.651	92%	459	102	68	2	0	0
25	Pengadilan Tinggi Makassar	1.010	6.422	5.991	93%	1.441	316	139	3	0	0
26	Pengadilan Tinggi Kendari	261	1.661	1.572	95%	350	47	28	1	0	0
27	Pengadilan Tinggi Gorontalo	113	695	692	100%	116	77	22	0	0	0
28	Pengadilan Tinggi Ambon	128	705	717	102%	116	57	36	1	0	0
29	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	75	645	665	103%	55	33	20	2	0	0
30	Pengadilan Tinggi Jayapura	220	1.479	1.245	84%	454	75	18	0	0	0
Total		20.765	144.206	138.830		26.139	4.959	2.577	80	0	12

3. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Seluruh Pengadilan Negeri Daerah Hukum
Pengadilan Tinggi di Indonesia Tahun 2015

Pria	:	720	Orang
Wanita	:	71	Orang

4. Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Seluruh Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi di Indonesia Tahun 2015

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Cabut	Sisa 2015	Bandung	Kasasi	Pk
1.	Banda Aceh	26	62	62	0	26	18	34	3
2.	Medan	35	123	105	0	53	35	33	2
3.	Padang	20	29	52	0	7	27	0	0
4.	Pekanbaru	36	132	116	0	52	46	26	6
5.	Jambi	17	60	47	0	30	18	16	0
6.	Palembang	18	66	66	0	18	13	12	1
7.	Bengkulu	10	81	77	0	14	16	14	1
8.	Tanjungkarang	24	64	63	0	25	3	4	1
9.	Bangkabelitung	10	39	37	0	12	7	14	0
10.	Jakarta	34	163	110	0	87	26	3	5
11.	Bandung	49	202	197	0	54	42	18	2
12.	Semarang	67	165	145	0	87	27	17	1
13.	Yogyakarta	5	22	25	0	2	14	11	2
14.	Surabaya	73	228	223	0	88	58	43	5
15.	Banten	15	58	56	0	34	7	7	2
16.	Denpasar	15	53	44	0	24	16	14	0
17.	Mataram	17	47	46	0	18	22	19	0
18.	Kupang	39	97	97	0	39	46	39	4

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Cabut	Sisa 2015	Bandung	Kasasi	Pk
19.	Pontianak	26	61	60	0	27	15	21	1
20.	Palangkaraya	9	60	64	0	5	11	7	1
21.	Banjarmasin	19	49	50	0	16	22	0	0
22.	Samarinda	27	50	40	0	37	15	13	0
23.	Manado	16	55	37	0	34	8	5	0
24.	Palu	45	71	82	0	34	29	43	0
25.	Makassar	63	120	83	0	100	22	26	3
26.	Kendari	17	57	48	0	26	12	8	1
27.	Gorontalo	11	34	34	0	11	17	13	0
28.	Ambon	35	60	69	0	26	12	15	1
29.	Maluku Utara	9	38	25	0	22	10	5	1
30.	Jayapura	65	90	87	0	68	22	17	1
JUMLAH		869	2.456	2.249	0	1.076	635	331	3

5. Jumlah Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Sisa 2015	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
1.	Banda Aceh	13	100	82	31	11	2	0	0	0
2.	Medan	11	413	401	23	27	25	0	0	0
3.	Padang	3	88	86	5	9	4	0	0	0
4.	Pekanbaru	10	217	196	31	11	5	0	0	0
5.	Jambi	2	67	63	6	7	5	0	0	0
6.	Palembang	11	373	368	16	11	6	0	0	0
7.	Bengkulu	5	115	101	19	7	2	0	0	0
8.	Tanjung Karang	10	225	218	17	12	4	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	40	39	1	2	2	0	0	0
10.	Jakarta	5	128	94	39	2	2	0	0	0
11.	Bandung	17	393	356	54	13	9	0	0	0
12.	Semarang	12	343	326	29	19	7	0	0	0
13.	Yogyakarta	1	50	42	9	12	4	0	0	0
14.	Surabaya	26	432	399	59	54	29	0	0	0
15.	Banten	5	96	82	19	11	3	0	0	0
16.	Denpasar	3	38	38	3	3	1	0	0	0
17.	Mataram	2	59	56	5	1	1	0	0	0
18.	Kupang	18	94	102	10	15	9	0	0	0

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Sisa 2015	Banding	Kasasi	Pk	Eksekusi	Grasi
19.	Pontianak	2	97	88	11	10	3	0	0	0
20.	Palangkaraya	0	71	66	5	3	4	0	0	0
21.	Banjarmasin	5	143	133	15	18	6	0	0	0
22.	Samarinda	3	112	97	18	3	1	0	0	0
23.	Manado	1	46	44	3	4	0	0	0	0
24.	Palu	3	61	52	12	4	2	0	0	0
25.	Makassar	34	556	494	96	52	18	0	0	0
26.	Kendari	3	100	89	14	12	1	0	0	0
27.	Gorontalo	0	10	7	3	0	0	0	0	0
28.	Ambon	8	48	54	2	5	6	0	0	0
29.	Maluku Utara	0	18	16	2	0	0	0	0	0
30.	Jayapura	0	51	45	6	2	1	0	0	0
JUMLAH		213	4.584	4.234	563	340	162	0	0	0

6. Jumlah Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2015

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Sisa 2015	Cabut	Banding	Kasasi	Pk
1.	Banda Aceh	3	6	8	0	1	0	3	0
2.	Medan	44	231	190	21	64	0	4	0
3.	Padang	3	22	17	1	7	0	8	2
4.	Pekanbaru	72	185	156	17	84	0	26	0
5.	Jambi	1	15	11	1	4	0	2	3
6.	Palembang	10	58	41	17	10	0	20	0
7.	Bengkulu	2	2	3	0	1	0	3	0
8.	Tanjung Karang	2	21	17	5	1	0	4	0
9.	Bangka Belitung	2	22	14	3	7	0	8	0
10.	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bandung	61	251	194	31	87	0	0	0
12.	Semarang	21	64	61	8	16	0	33	0
13.	Yogyakarta	4	7	9	2	0	0	2	2
14.	Surabaya	45	176	133	31	57	0	75	10
15.	Banten	38	85	33	9	81	0	1	0
16.	Denpasar	2	15	9	2	6	0	4	2
17.	Mataram	2	9	9	2	0	0	7	0
18.	Kupang	0	29	21	8	0	0	7	0

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Sisa 2015	Cabut	Banding	Kasasi	Pk
19.	Pontianak	1	23	16	1	7	0	0	0
20.	Palangkaraya	3	10	7	2	24	0	0	0
21.	Banjarmasin	4	16	9	3	8	0	0	0
22.	Samarinda	10	91	49	7	45	0	4	0
23.	Manado	10	17	18	2	7	0	0	0
24.	Palu	3	29	31	0	1	0	7	1
25.	Makassar	21	34	22	0	33	0	0	0
26.	Kendari	2	12	6	0	8	0	0	0
27.	Gorontalo	10	40	3	6	5	0	13	0
28.	Ambon	0	7	4	0	3	0	0	0
29.	Maluku Utara	0	31	26	4	1	0	11	0
30.	Jayapura	8	31	30	5	4	0	7	0
JUMLAH		384	1.539	1.180	187	556	0	227	20

7. Jumlah Perkara Niaga Pada Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi di Indonesia Tahun 2015

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Cabut	Sisa 2015	Bandung	Kasasi	PK
1.	Medan	5	28	26	4	3	0	3	0
2.	Jakarta	46	245	176	43	72	0	42	2
3.	Semarang	1	28	16	2	11	0	0	0
4.	Surabaya	19	47	33	8	25	0	12	0
5.	Makassar	0	7	7	0	0	0	1	2
JUMLAH		71	355	258	57	111	0	58	4

8. Jumlah Perkara Perikanan Pada Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi di Indonesia Tahun 2015

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Sisa 2015	Cabut	Bandung	Kasasi	Pk
1.	Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Medan	0	15	15	0	0	3	0	0
3.	Padang	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pekanbaru	2	60	46	0	16	15	5	0
5.	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tanjung Karang	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Jakarta	0	6	0	0	0	4	0	0
11.	Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Pengadilan Tinggi	Sisa 2014	Masuk 2015	Putus 2015	Sisa 2015	Cabut	Banding	Kasasi	Pk
12.	Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Denpasar	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Pontianak	6	59	57	0	8	1	0	0
20.	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Manado	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Palu	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Makassar	0	0	5	0	0	4	0	0
26.	Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	5	0
28.	Ambon	0	15	15	0	0	6	0	0
29.	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Jayapura	0	15	15	0	0	7	0	0
JUMLAH		8	175	159	0	24	40	10	0

9. Kelengkapan Formal Berkas Perkara

a. Perkara Perdata

Dalam proses penyelesaian berkas perkara di Mahkamah Agung ada dua kegiatan teknis yang dilakukan diantaranya Proses Administrasi Perkara dan Proses Teknis Perkara, kedua proses tersebut sangat terkait satu sama lain dan proses teknis perkara belum dapat dilakukan pemeriksaan apabila kelengkapan berkas belum terpenuhi. Untuk melaksanakan administrasi perkara di Mahkamah Agung dilakukan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata dan Panitera Muda Mahkamah Agung RI dalam penomoran, distribusi ke majelis dan pengiriman putusan ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris tanggal 13 Maret 2006 Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata, berkas yang sudah ditelaah akan dapat diketahui kelengkapannya, apakah berkas sudah lengkap atau tidak lengkap. Mengenai berkas yang sudah lengkap dapat diteruskan ke Panitera Muda Perdata untuk dapat diberi nomor register dan untuk berkas yang tidak lengkap akan dimintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju berkasnya disimpan di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung RI sampai ada jawabannya.

Sejak tanggal 2 Januari 1998 setiap berkas perkara permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI harus memenuhi syarat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bundel A terdiri dari :

- Surat Gugatan;
- Penetapan penunjukan Majelis/Hakim;
- Penetapan Hari Sidang;
- Relas-relas Panggilan;

- Berita Acara Sidang (Jawaban/replik/duplik pihak-pihak, di masukkan dalam kesatuan Berita Acara);
- Surat Kuasa dari kedua belah pihak (bila memakai kuasa);
- Penetapan Sita Contervatoir/Revindicatoir;
- Berita Acara Sita Contervatoir/Revindicatoir;
- Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada);
- Surat-surat bukti tergugat;
- Tanggapan bukti-bukti tergugat dan Penggugat;
- Tanggapan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;
- Berita Acara Pemeriksaan setempat;
- Surat-surat lainnya;

Bundel B : (Berkas B)

- Relas-relas pemberitahuan isi putusan banding/kasasi kepada kedua belah pihak
- Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali;
- Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi/Peninjauan Kembali (khusus untuk Peninjauan Kembali Surat Kuasa harus berdiri sendiri/tidak beragam dari Pengadilan Negeri);
- Memberi Kasasi/Memori Peninjauan Kembali, dilampiri dengan surat bukti tanda terima memori kasasi/peninjauan kembali;
- Tanda terima Memori Kasasi/Peninjaun Kembali;
- Relas Pemberitahuan Kasasi/Peninjauan Kembali kepada pihak lawan;
- Surat Pemberitahuan dan penyerahan salinan Memori Kasasi/Peninjaun Kembali kepada pemohon kasasi/peninjauan kembali;
- Kontra Memori Kasasi/Peninjauan Kembali (bila ada);
- Relas pemberitahuan Kontra Memori Kasasi/Peninjauan Kembali kepada pihak lawan;
- Relas memberikan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara/permohonan (In zage);
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri;

- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi;
- Salinan Putusan Mahkamah Agung (bila permohonan PK);
- Tanda Bukti Setoran Biaya Kasasi/Peninjauan Kembali yang syah dari Bank;
- CD-R putusan
- Surat-surat lain apabila ada.

Bahwa dalam proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata adalah tentang kelengkapan dan syarat formil suatu perkara.

**Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara dan Surat Masuk yang Diterima dari
Tata Usaha Biro Umum Mahkamah Agung RI Serta Surat Keluar pada
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Bulan Januari s/d Desember 2015**

No.	Bulan	Berkas Masuk	Berkas Perkara Masuk Dan Jenisnya				Jenis Surat			Keterangan
			Kasasi Perdata Umum	PK Perdata Umum	Kasasi Perdata Khusus	PK Perdata Khusus	Surat Masuk	Surat Keluar	Tembusan	
1.	Januari	388	267	46	70	5	172	133	172	Surat Masuk mencakup: - Hal Jawaban Surat Keluar; - Mempertanyakan Proses Perkara; - Hal Pemberitahuan Perkara; - Tidak Memenuhi Syarat Formal; - Dll Surat Keluar mencakup: - Hal Permintaan Kekurangan Kelengkapan Berkas Perkara Ke Pengadilan Pengaju - Dll
2.	Februari	422	283	51	75	13	177	124	730	
3.	Maret	518	340	56	109	13	218	134	767	
4.	April	422	279	55	68	20	233	132	729	
5.	Mei	418	279	58	70	11	187	115	665	
6.	Juni	420	296	50	60	14	190	152	886	
7.	Juli	341	234	39	58	10	163	133	827	
8.	Agustus	376	275	53	38	10	177	137	790	
9.	September	535	378	77	75	5	280	109	580	
10.	Oktober	543	315	66	141	21	224	185	1082	
11.	November	480	336	62	78	4	229	173	1081	
12.	Desember	223	169	33	17	4	213	133	749	
Jumlah		5086	3451	646	859	130	2463	1660	2398	

Keterangan :

- Perkara Perdata Umum : 4097 berkas
- Perkara Perdata Khusus : 989 berkas
- Jumlah : 5086 berkas

**Rekapitulasi Pendistribusian Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Dan
Peninjauan Kembali Perdata Khusus Dari Tata Usaha
Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata
Bulan Januari s/d Desember 2015**

No	Bulan	Pk Perdata umum	Pk Perdata khusus	PHI	HAKI	Kepailitan	Parpol	KPPU	BPSK	Arbitrase	Lt	Keterangan
1.	Januari	46	5	1	0	3	1	0	0	0	0	
2.	Februari	51	13	10	2	0	0	0	0	1	0	
3.	Maret	56	13	8	3	2	0	0	0	0	0	
4.	April	55	20	17	2	0	0	0	0	1	0	
5.	Mei	58	11	8	3	0	0	0	0	0	0	
6.	Juni	50	14	9	0	3	0	0	1	1	0	
7.	Juli	39	10	5	1	4	0	0	0	0	0	
8.	Agustus	53	10	5	1	3	1	0	0	0	0	
9.	September	77	5	4	0	1	0	0	0	0	0	
10.	Oktober	66	21	12	1	5	0	1	0	2	0	
11.	November	62	4	2	1	1	0	0	0	0	0	
12.	Desember	33	4	3	1	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	646	130	84	15	22	2	1	1	5	0	

Keterangan :

- Perkara PK Perdata Umum : 646 berkas
- Perkara PK Perdata Khusus : 130 berkas
- Jumlah : 776 berkas

**Rekapitulasi Pendistribusian Berkas Kasasi Perdata Umum Dan Kasasi Perdata Khusus Dari
Tata Usaha Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata
Bulan Januari s/d Desember 2015**

No	Bulan	Kasasi Perdata Umum	Kasasi Perdata Khusus	PHI	HAKI	Kepailitan	Parpol	KPPU	BPSK	Arbitrase	Kasasi SIP	LT	Keterangan
1.	Januari	267	70	53	5	5	1	0	4	2	0	0	
2.	Februari	283	75	67	1	2	2	2	1	0	0	0	
3.	Maret	340	109	81	10	8	3	0	6	0	0	0	
4.	April	279	68	55	4	3	0	0	3	2	1	0	
5.	Mei	279	70	57	4	3	3	1	2	0	0	0	
6.	Juni	296	60	51	1	4	0	1	2	1	0	0	
7.	Juli	234	58	44	6	5	0	1	2	0	0	0	
8.	Agustus	275	38	31	2	1	0	0	2	1	1	0	
9.	September	378	75	52	5	7	1	1	9	0	0	0	
10.	Oktober	315	141	108	6	10	1	3	11	2	0	0	
11.	November	336	78	55	2	4	0	1	16	0	0	0	
12.	Desember	169	17	14	1	1	0	0	1	0	0	0	
	Jumlah	3451	859	668	47	53	11	10	59	8	2	0	

Keterangan :

- Perkara Kasasi Perdata Umum : 3451 berkas
- Perkara Kasasi Perdata Khusus : 859 berkas
- Jumlah : 4310 berkas

**Laporan Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Dan PK Perdata Khusus Pada Tahun 2015
Bulan Januari s/d Desember 2015**

No	Bulan	Kasasi								Peninjauan kembali							
		Pailit	Haki	Arbitrase	KPPU	BPSK	Parpol	PHI	SIP	Pailit	Haki	Arbitrase	KPPU	BPSK	Parpol	PHI	SIP
1.	Januari	5	5	2	-	4	1	53	-	3	-	1	-	-	-	1	-
2.	Februari	2	1	-	2	1	2	67	-	-	2	1	-	-	-	10	-
3.	Maret	8	9	1	-	4	3	80	-	2	3	-	-	-	-	8	-
4.	April	3	5	2	-	4	-	56	-	-	2	1	-	-	-	17	-
5.	Mei	2	4	-	1	2	2	58	-	-	3	-	-	-	-	9	-
6.	Juni	4	2	1	1	2	2	51	-	3	-	1	-	1	-	9	-
7.	Juli	2	3	-	1	2	-	16	-	2	1	-	-	-	-	1	-
8.	Agustus	4	5	-	1	-	-	58	1	5	1	-	1	-	-	8	-
9.	September	4	5	1	1	8	1	51	-	1	-	-	-	-	-	4	-
10.	Oktober	13	6	2	3	14	1	109	-	5	1	2	1	-	-	12	-
11.	November	4	2	-	1	16	-	55	-	1	1	-	-	-	-	2	-
12.	Desember	1	1	-	-	1	-	14	-	-	1	-	-	-	-	3	-
Jumlah		52	48	9	11	58	12	668	1	22	15	6	2	1	0	84	0

**Daftar Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Dan PK Perdata Khusus
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Bulan Januari s/d Desember 2015**

No	Bulan	Perdata Khusus									
		Kasasi					Peninjauan Kembali				
		Berkas Masuk	Lengkap	Tidak Lengkap		NO	Berkas Masuk	Lengkap	Tidak Lengkap		NO
				Dokumen Elektronik	Kekurangan Lain				Dokumen Elektronik	Kekurangan Lain	
1.	JANUARI	70	54	7	7	2	5	4	1	-	-
2.	FEBRUARI	75	63	1	9	2	13	7	-	6	-
3.	MARET	105	97	6	1	1	13	11	-	2	-
4.	APRIL	70	55	1	9	5	20	17	-	3	-
5.	MEI	69	56	3	8	2	12	10	2	-	-
6.	JUNI	64	57	-	6	1	14	12	-	2	-
7.	JULI	24	23	-	1	-	4	3	-	1	-
8.	AGUSTUS	68	60	-	7	1	15	14	-	1	-
9.	SEPTEMBER	71	53	7	9	2	5	4	-	1	-
10.	OKTOBER	148	114	14	14	6	21	18	2	1	-
11.	NOVEMBER	78	70	-	7	1	4	3	-	1	-
12.	DESEMBER	17	15	-	2	-	4	3	-	1	-
JUMLAH		859	717	39	80	23	130	106	5	19	0

Catatan :

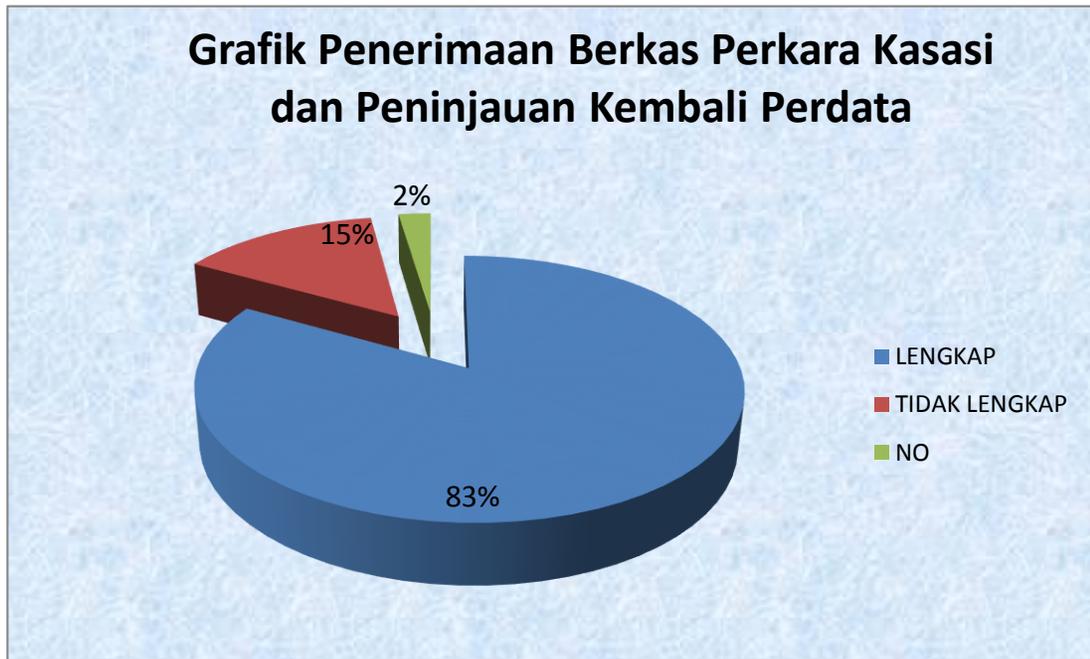
Berkas yang belum terjawab

Kasasi :

1. PHI : 3 Berkas
2. Palit : 2 Berkas
3. Haki : 2 Berkas

- PK
1. PHI : 5 Berkas
 2. Palit : 1 Berkas

Grafik Penerimaan Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata



Jumlah Perkara Kasasi Perdata Khusus yang masuk tahun 2015 adalah 859, lengkap 717, tidak lengkap 119, NO 23 dan jumlah Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus yang masuk tahun 2015 adalah 130, lengkap 106, tidak lengkap 24. Prosentase berkas perkara perdata khusus adalah berkas lengkap 84% atau 823 berkas, berkas tidak lengkap 14% atau 143 berkas dan NO 2% atau 23 berkas. Berkas lengkap dan NO diteruskan ke Panitera Muda Perdata, berkas tidak lengkap dimintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju dan akan diteruskan ke Panitera Muda Perdata setelah mendapatkan kelengkapan dari Pengadilan Pengaju.

**Daftar Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perdata
Bulan Januari s/d Desember Tahun 2015**

No	Bulan	Perdata							
		Kasasi				Peninjauan kembali			
		Berkas Masuk	Berkas Selesai Ditelaah		N.O	Berkas Masuk	Berkas Selesai Ditelaah		N.O.
			Lengkap	Tidak lengkap			Lengkap	Tidak lengkap	
1	Januari	389	264	116	9	46	17	14	2
2	Februari	283	188	91	4	51	22	13	1
3	Maret	283	184	91	8	47	23	14	1
4	April	337	239	94	4	64	22	22	3
5	Mei	218	163	55	-	49	27	20	2
6	Juni	357	263	89	5	59	16	17	2
7	Juli	234	180	52	2	39	12	12	-
8	Agustus	220	164	54	2	45	12	10	-
9	September	382	262	112	8	69	21	18	-
10	Oktober	366	266	97	3	82	36	23	3
11	November	336	259	73	4	62	12	6	-
12	Desember	169	137	30	2	33	18	15	-
	Jumlah	3.574	2.569	954	51	646	238	184	14

Grafik Penerimaan Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata



Jumlah Perkara Kasasi Perdata yang masuk tahun 2015 adalah 3.574, lengkap 2.569, tidak lengkap 954, N.O. 51 dan jumlah Perkara Peninjauan Kembali Perdata yang masuk tahun 2015 adalah 646, lengkap 238, tidak lengkap 184. Prosentase berkas perkara perdata adalah berkas lengkap 70% atau 2.807 berkas, berkas tidak lengkap 28% atau 1.138 berkas dan NO 2% atau 65 berkas. Berkas lengkap dan NO diteruskan ke Panitera Muda Perdata, berkas tidak lengkap dimintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju dan akan diteruskan ke Panitera Muda Perdata setelah mendapatkan kelengkapan dari Pengadilan Pengaju.

b. Perkara Pidana

Sama halnya dengan apa yang dilaksanakan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata, proses teknis perkara belum dapat dilakukan pemeriksaan apabila kelengkapan berkas belum terpenuhi. Pelaksanaan administrasi perkara di Mahkamah Agung dilakukan baik pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana maupun oleh Panitera Muda berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris tanggal 13 Maret 2006 Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana adalah melakukan penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi baik Pidana maupun Pidana Khusus yang dikirim oleh Pengadilan Pengaju.

Bahwa Berkas yang ditelaah dan diketahui kelengkapan formilnya berkas diteruskan ke Panitera Muda Pidana maupun Pidana Khusus untuk dapat diberi Nomor Registrasi dan berkas yang tidak lengkap dimintakan kelengkapannya kepada pengadilan pengaju berkasnya disimpan di Mahkamah Agung RI sampai ada jawabannya.

Sejak tanggal 2 Januari 1998 setiap berkas perkara permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI harus memenuhi syarat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bundel A terdiri dari:

- Berkas perkara penyidik;
- Pelimpahan perkara dari dan Jaksa Penuntut Umum;
- Penetapan penunjukan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang;
- Relas panggilan;
- Perintah/penetapan penahanan;
- Penetapan ijin penyitaan (bila ada);

- Penetapan ijin penggeledahan (bila ada);
- Surat kuasa khusus Penasehat Hukum;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Berita Acara Sidang;
- Tuntutan pidana;
- Pembelaan, replik dan duplik;
- Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (Bila ada);

Sedangkan Bundel B terdiri dari:

- Daftar isi dan Surat pengantar;
- Akta pemberitahuan putusan tingkat banding;
- Akta permohonan pemeriksaan kasasi;
- Akta Pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi;
- Memori kasasi/tambahan memori kasasi;
- Akta penerimaan memori kasasi/tambahan memori kasasi;
 - a. Akta terlambat mengajukan memori kasasi;
 - b. Akta tidak mengajukan memori kasasi;
 - c. Akta terlambat mengajukan memori kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera;
- Akta pemberitahuan/penyerahan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada Termohon kasasi;
- Kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi;
- Akta pemberitahuan/Penyerahan kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi;
- Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Pemohon;
- Dua eksemplar salinan resmi putusan sela (bila ada);
- Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama;
- Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding;
- Surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari terdakwa;
- CD-R Putusan;
- Surat-surat lainnya.

Berkas perkara permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI harus memenuhi syarat kelengkapan formil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bundel A terdiri dari :

- Berkas perkara penyidik;
- Pelimpahan perkara dari dan Jaksa Penuntut Umum;
- Penetapan penunjukkan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang;
- Relas panggilan;
- Perintah/penetapan penahanan;
- Penetapan ijin penyitaan (bila ada);
- Penetapan ijin penggeledahan (bila ada);
- Surat kuasa khusus Penasehat Hukum;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Berita Acara Sidang;
- Tuntutan pidana;
- Pembelaan, replik dan duplik;
- Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (bila ada);

Bundel B terdiri dari :

- Daftar isi dan Surat Pengantar;
- Relas Pemberitahuan Putusan, PT dan atau MA kepada Pemohon
- Surat keterangan permohonan peninjauan kembali yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon;
- Surat Permohonan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasannya;
- Salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Salinan putusan Pengadilan Tingkat Banding (bila ada);
- Salinan putusan Mahkamah Agung (bila ada);
- Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pasal 265 KUHAP;
- CD-R Putusan, Dakwaan, Tuntutan;

- Surat-surat lainnya.

Sedangkan Permohonan Grasi terdiri dari :

- Surat Pengantar;
- Daftar isi berkas perkara;
- Akta berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan Grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi;
- Salinan Permohonan Grasi dan Terpidana untuk kuasanya atau Surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada);
- Surat kuasa dari Terpidana untuk kuasanya atau Surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada);
- Berita Acara Sidang;
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Putusan Pengadilan Tingkat Banding (jika ada);
- Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
- Putusan Peninjauan Kembali (bila ada);
- Surat Dakwaan;
- Eksepsi, dan putusan sela (jika ada);
- Surat Tuntutan;
- Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada);
- Surat Penetapan penunjukan hakim;
- Surat Penetapan hari sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.

Berkas Perkara Yang Masuk Pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Tahun 2015
Bulan Januari s/d Desember 2015

Bulan	Masuk		Kasasi				PK Dan Grasi				Keterangan			
	Kasasi	Pk + Grasi	Pidana Umum		Pidana Khusus		PK		Grasi					
			TAH	LT	TAH	LT	Umum	Khusus	Umum	Khusus				
Januari	494	32	28	144	189	133	11	20	0	1	Sisa Berkas	Administrasi	Penelaahan	
Februari	262	39	24	86	93	59	10	27	1	1	PIDUM	0	0	Berkas
Maret	443	36	36	150	141	116	15	20	1	0	PIDSUS	28	0	Berkas
April	363	41	28	115	138	82	9	22	6	4	PK Umum	11	0	Berkas
Mei	272	24	32	75	109	56	3	19	2	0	PK Khusus	9	0	Berkas
Juni	351	40	26	118	123	84	11	20	3	6	Grasi Umum	0	0	Berkas
Juli	295	24	30	108	110	47	5	13	3	3	Grasi Khusus	0	0	Berkas
Agustus	345	23	30	101	133	81	6	14	1	2				
September	360	46	35	121	108	96	15	28	0	3				
Oktober	351	34	37	99	118	97	9	22	1	2				
November	382	34	36	117	136	93	16	15	0	3				
Desember	250	32	32	49	125	44	11	18	0	3				
JUMLAH	4168	405	374	1283	1523	988	121	238	18	28		48	0	Berkas
	4573													

Berkas sisa bulan Desember : 11
 Berkas Masuk : 4573
 Berkas ke Panmud : 4514 - 59
 Berkas Surat menyurat : 48
 Berkas Penelaahan : 0

Keterangan:
 PK : Peninjauan kembali
 TAH : Tahanan
 LT : Luar Tahanan
 PIDUM : Pidana Umum
 PIDSUS : Pidana Khusus

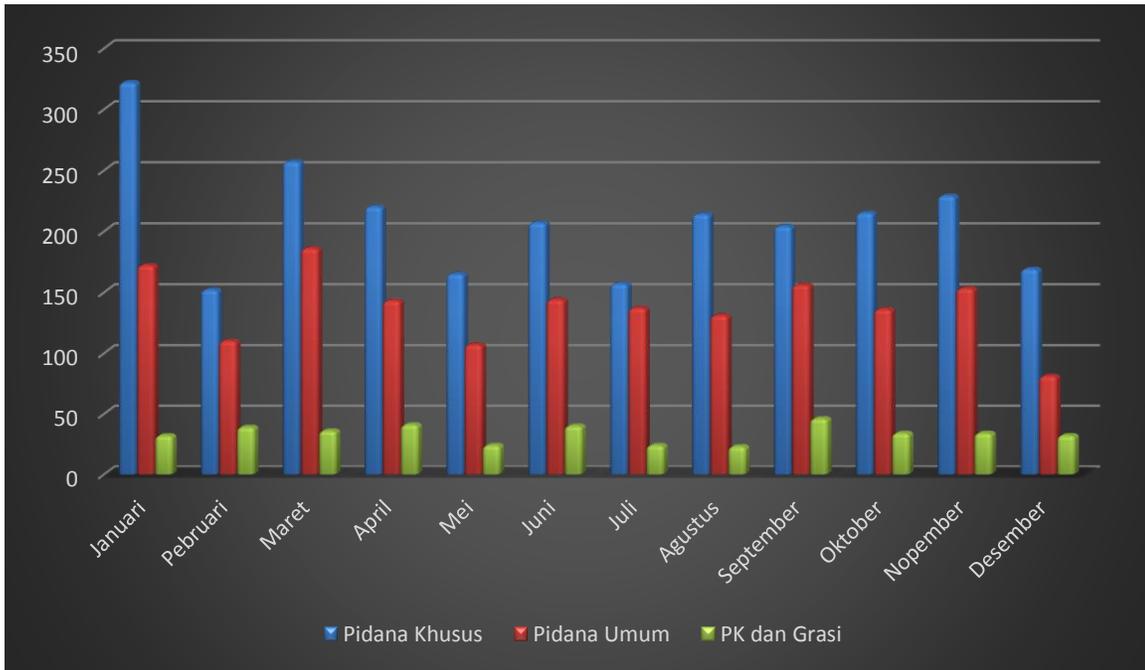
**Berkas Perkara Pidana yang dikirim ke Panitera Muda Pidana Tahun 2015
Bulan Januari s/d Desember 2015**

Bulan	Kasasi				PK Dan Grasi				Keterangan
	Pidana Umum		Pidana Khusus		PK		Grasi		
	TAH	LT	TAH	LT	Umum	Khusus	Umum	Khusus	
Januari	36	141	177	127	8	17	1	1	
Februari	24	85	105	64	4	23	1	1	
Maret	36	117	141	107	13	23	1	0	
April	28	74	138	58	13	12	5	4	
Mei	32	138	109	60	7	25	2	0	
Juni	26	117	110	80	5	18	2	6	
Juli	26	92	123	68	3	6	3	2	
Agustus	35	107	133	74	2	10	1	1	
September	35	116	108	118	16	32	0	3	
Oktober	37	93	118	98	14	34	2	1	
November	35	106	136	90	11	17	0	2	
Desember	32	78	100	44	9	17	0	4	
JUMLAH	382	1264	1498	988	105	234	18	25	
	4.514								

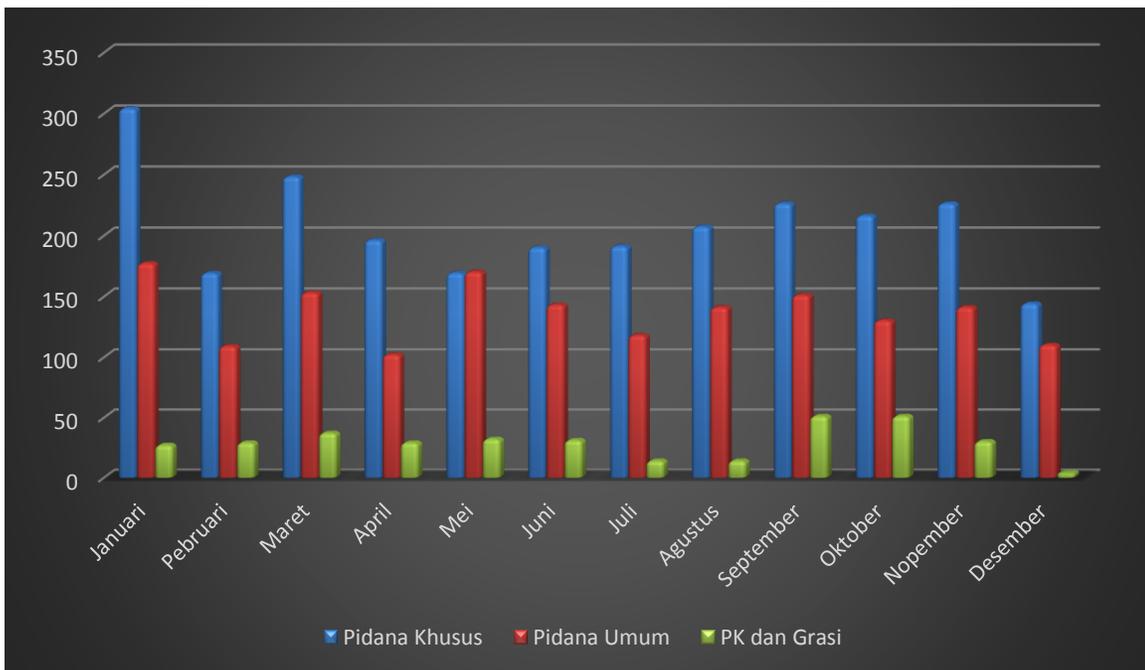
**Laporan Surat Masuk Kelengkapan Berkas dari Mahkamah Agung Pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana
Pada Bulan Januari s/d Desember 2015**

Bulan	Pidana Umum	Pidana Khusus	Peninjauan Kembali	Grasi	Panmud Sus	Panmud Um	Arsip	Keterangan
Januari	2	12	5	1	2	1	14	Surat – surat tersebut sudah distribusikan sesuai dengan peruntkannya
Februari	12	11	11	0	4	0	18	
Maret	14	20	6	0	3	1	25	
April	18	28	18	1	5	4	34	
Mei	11	16	13	0	9	4	32	
Juni	16	39	3	0	6	1	23	
Juli	7	15	4	0	3	2	14	
Agustus	16	18	16	0	16	2	22	
September	21	13	4	1	8	9	29	
Oktober	13	24	6	2	3	6	22	
November	27	19	15	2	2	3	12	
Desember	10	18	4	1	12	4	20	
JUMLAH	167	233	105	8	73	37	265	
	888							

Grafik Penerimaan Berkas sampai dengan Tahun 2015



Grafik Berkas yang dikirim ke Panitera Muda



10. Laporan Keuangan Perkara

a. Laporan Statistik Uang Denda Pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2015

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Total		Keterangan
1.	Banda Aceh	Rp.	451.996.113.000	
2.	Medan	Rp.	457.455.128.500	
3.	Padang	Rp.	110.293.403.260	
4.	Pekanbaru	Rp.	3.062.241.669.500	
5.	Jambi	Rp.	159.924.862.460	
6.	Palembang	Rp.	142.778.574.000	
7.	Bengkulu	Rp.	43.271.850.000	
8.	Tanjung Karang	Rp.	110.446.762.400	
9.	Bangka Belitung	Rp.	57.481.379.590	
10.	Jakarta	Rp.	594.046.144.000	
11.	Bandung	Rp.	683.189.016.988	
12.	Semarang	Rp.	41.826.802.289	
13.	Yogyakarta	Rp.	1.320.494.000	
14.	Surabaya	Rp.	909.188.185.926	
15.	Banten	Rp.	350.858.916.000	
16.	Denpasar	Rp.	13.759.865.200	

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Total		Keterangan
17.	Mataram	Rp.	5.670.696.529	
18.	Kupang	Rp.	54.430.754.000	
19.	Pontianak	Rp.	968.148.891.000	
20.	Palangkaraya	Rp.	208.770.917.590	
21.	Banjarmasin	Rp.	173.394.427.789	
22.	Samarinda	Rp.	3.167.265.477.000	
23.	Manado	Rp.	1.714.494.500	
24.	Palu	Rp.	15.769.140.452	
25.	Makassar	Rp.	124.918.934.108	
26.	Kendari	Rp.	31.024.965.500	
27.	Gorontalo	Rp.	711.294.500	
28.	Ambon	Rp.	6.541.700.000	
29.	Maluku Utara	Rp.	36.809.276.000	
30.	Jayapura	Rp.	23.308.113.000	
Total		Rp.	12.008.558.249.081	

b. Laporan Statistik Perkara Lalu Lintas Pada Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi Tahun 2015

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Total		Keterangan
1.	Banda Aceh	Rp.	22491	
2.	Medan	Rp.	154937	
3.	Padang	Rp.	77441	
4.	Pekanbaru	Rp.	94267	
5.	Jambi	Rp.	24331	
6.	Palembang	Rp.	55839	
7.	Bengkulu	Rp.	26437	
8.	Tanjung Karang	Rp.	98971	
9.	Bangka Belitung	Rp.	14335	
10.	Jakarta	Rp.	351531	
11.	Bandung	Rp.	536922	
12.	Semarang	Rp.	931615	
13.	Yogyakarta	Rp.	24794	
14.	Surabaya	Rp.	842449	
15.	Banten	Rp.	155471	
16.	Denpasar	Rp.	60353	
17.	Mataram	Rp.	78939	
18.	Kupang	Rp.	10903	
19.	Pontianak	Rp.	41118	
20.	Palangkaraya	Rp.	28906	

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Total		Keterangan
21.	Banjarmasin	Rp.	37891	
22.	Samarinda	Rp.	59849	
23.	Manado	Rp.	32808	
24.	Palu	Rp.	10088	
25.	Makassar	Rp.	46385	
26.	Kendari	Rp.	9665	
27.	Gorontalo	Rp.	9067	
28.	Ambon	Rp.	17893	
29.	Maluku Utara	Rp.	11298	
30.	Jayapura	Rp.	8288	
Total		Rp.	3875282	

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Manajemen Aset/Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara (BMN) dan Persuratan.

Selama periode Tahun Anggaran 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengelola Persuratan dan Aset/Barang Milik Negara meliputi:

a. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan Gedung dan/atau Bangunan Rumah Negara/Dinas yang diperuntukan untuk para Hakim, Pejabat di Lingkungan peradilan umum.

Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum Mahkamah Agung RI tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Nomor Sertifikat Tanah
1.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	352	Pakai No 62
2.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	398	Pakai No 64
3.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	296	Pakai No 67
4.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	416	Pakai No 68
5.	Jl. Sitalasari Rt.02 Rw.03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	335	Pakai No 69
6.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	337	Pakai No 104
7.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	266	Pakai No 103
8.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	266	Pakai No 105
9.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	266	Pakai No 109

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Nomor Sertifikat Tanah
10.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	377	Pakai No 114
11.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	266	Pakai No 111
12.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	264	Pakai No 108
13.	Jl. Cipinang Jaya LL Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan	263	Pakai No 107
14.	Jl. Cipinang Jaya LL No.B2 Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	266	Pakai No 112
15.	Jl. Cipinang Jaya LL No. B4 Rt.01 Rw.08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	266	Pakai No 113
16.	Jl. Ampera Raya Gang Sulastri Rt.05 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	4.724	Pakai No 10
17.	Jl. Ampera Raya Gang Rini Rt.06 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	3108	Pakai No 16
18.	Jl. Agung Tengah 1 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	4.075	Pakai No 41
19.	Jl. Agung Tengah 1 dan 4 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	960	Pakai No 53
20.	Jl. Terusan I Komplek Kehakiman Rt.08 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	152	Pakai No 59
21.	Jl. Ampera Raya Gang Kancil Rt.03 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	2.325	Pakai No 12
22.	Jl. Swakarsa 4 Rt.03 Rw.02 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	813	Pakai No 524
23.	Jl. Sunter Mas Komplek Kehakiman, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	9.240	Pakai No 62
24.	Jl. Cipinang Jaya LL No.B5, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	270	Pakai No 110

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Nomor Sertifikat Tanah
25.	Jl. Agung Tengah 1, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok	10.138	Pakai No 41
TOTAL		40.439	

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Kode Barang	Golongan/Type	Jumlah
1.	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit
2.	4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Type B Permanen	7 unit
3.	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	56 unit
4.	4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	2 unit
5.	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	9 unit
6.	4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	14 unit
7.	4.01.02.03.004	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	3 unit
8.	4.01.02.03.007	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket.
1.	Roda 4 (empat)	Toyota Avanza	2007	4 unit	
2.	Roda 4 (empat)	Toyota Avanza	2006	12 unit	
3.	Roda 4 (empat)	Toyota Rush	2014	1 Unit	
4.	Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova	2006	1 unit	
5.	Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Innova	2015	1 unit	
6.	Roda 6 (enam)	Mitsubishi Bus	2007	1 unit	
7.	Roda 6 (enam)	Hyundai Bus	2009	2 unit	
8.	Roda 6 (enam)	Toyota Dyna Bus	2013	2 unit	
9.	Roda 2 (dua)	Honda/GL 160 D	2003	1 unit	
10.	Roda 2 (dua)	Honda/GL 160 D	2005	2 unit	
11.	Roda 2 (dua)	Honda/GL 160 D	2006	3 unit	
12.	Roda 2 (dua)	Honda/NF 125 TRF	2005	1 unit	
13.	Roda 2 (dua)	Honda/NF 125 TRF	2008	6 unit	
14.	Roda 2 (dua)	Honda/GL PRO III	2005	5 unit	
15.	Roda 2 (dua)	Honda/GL PRO III	2006	1 unit	
16.	Roda 2 (dua)	Honda Supra X 125	2015	2 unit	

d. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket.
1.	Personal Komputer (PC)	192 Unit	
2.	Notebook/Laptop	124 Unit	
3.	Printer	179 Unit	

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket.
4.	Scanner	32 Unit	
5.	External Portable Hardisk	14 Unit	
6.	Server	8 Unit	
7.	Infocus	10 Unit	
8.	Kamera Digital / DSLR/ Electronics	9 Unit	
9.	Handy Cam	7 Unit	
10.	Filling Kabinet Besi	184 Unit	
11.	Lemari Besi	267 Unit	
12.	Rak Besi	57 Unit	
13.	Workstation	49 Unit	
14.	Kursi Besi/Metal	682 Unit	

e. Persuratan

Adapun klasifikasi surat tersebut adalah:

1. Surat Masuk

- Surat usul promosi/mutasi tenaga teknis berjumlah 8065 surat
- Surat pengajuan HD, DP3, Cuti dan Bezetting berjumlah 6473 surat
- Surat pengajuan kasasi dan PK perkara perdata dan pidana berjumlah 264 surat
- Surat laporan kekurangan kelengkapan kasasi dan PK perkara pidana/perdata berjumlah 236 surat
- Surat laporan statistik keuangan perkara berjumlah 9219 surat
- Surat usul kenaikan klas pengadiln berjumlah 100 surat
- Surat yang berkenaan dengan keuangan berjumlah 2073 surat
- Surat yang berkenaan dengan asset/gedung berjumlah 1080 surat
- Surat tanda terima barang berjumlah 154 surat
- Surat-surat lain (surat diluar klasifikasi tersebut diatas) berjumlah 533 surat

Total keseluruhan jumlah surat yang masuk di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015 berjumlah 28197 surat.

2. Surat Keluar

Melaksanakan Penomoran surat yang terdiri dari :

- Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berjumlah 6687
- Surat dari Direktorat Tenaga Teknis berjumlah 1456
- Surat dari Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum berjumlah 314
- Surat dilingkungan Sekretariat Ditjen Badilum berjumlah 2297

Total jumlah penomoran surat tahun 2015 berjumlah 10754 dan total jumlah pengiriman surat keluar tahun 2015 berjumlah 2199 surat. Pengiriman surat keluar melalui PT Pos Indonesia sebanyak 67283 surat. Total surat keluar tahun 2015 berjumlah 69482 surat

Pertanggungjawaban Pengiriman surat keluar tahun 2015 Total pembayaran pengiriman surat keluar tahun 2015 adalah Rp. 1.020.147.000,-

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja. Oleh karena itu Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung terus dilakukan sepanjang tahun 2015 antara lain dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)

No	Uraian Pekerjaan / Pengadaan Belanja Modal	Volume	Ket.
1.	Ac Portable/Standing	2 unit	
2.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	
3.	Lemari Besi	20 unit	
4.	Mesin Tik Elektrik	7 Unit	
5.	Rak Arsip	25 Unit	
6.	Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca	55 Unit	
7.	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit	
8.	Trolley Keranjang Besi	8 Unit	

No	Uraian Pekerjaan / Pengadaan Belanja Modal	Volume	Ket.
9.	Camera Pocket	3 Unit	
10.	Wireless Access Point dan Switch	1 Paket	
11.	Sound System dan Speaker	1 Paket	
12.	Televisi	4 Unit	
13.	Camera DSLR	2 Unit	
14.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)	2 Unit	
15.	Kendaraan Dinas Roda 4 (Toyota Kijang Innova)	1 Unit	
16.	Kendaraan Operasional Bus (Mitsubishi FE 71)	1 Unit	
17.	Komputer/P.C Unit	50 Unit	
18.	Notebook/Laptop	10 Unit	
19.	Scanner	16 Unit	
20.	Printer	12 Unit	
21.	Mesin Fax	8 Unit	

b. Pengadaan Kebutuhan/Keperluan Perkantoran (Belanja Barang)

No	Uraian Pekerjaan / Pengadaan Belanja Barang	Volume	Ket.
1.	Keperluan Pokok Pegawai (Air Minum, Kopi, Teh, Gula dll)	12 Bulan	
2.	Alat Tulis Kantor (ATK)	2 Paket	
3.	Pakaian Kerja Pegawai, Pramubakti/Pengemudi	218 Stel	
4.	Sewa Mobil Dinas Eselon II	5 Unit/Tahun	
5.	Sewa Mesin Fotocopy	6 Unit	
6.	Sewa Tanaman dalam Pot	12 Bulan	
7.	Provider Internet	12 Bulan	
8.	Pewangi Ruangan dan Pemeliharaan	12 Bulan	
9.	Buku Agenda Kerja	300 Buku	
10.	Pencetakan dan Penjilidan	1 Paket	
11.	Map dan Amplop	1 Paket	

No	Uraian Pekerjaan / Pengadaan Belanja Barang	Volume	Ket.
12.	Blanko/Formulir/Kop Surat/Program Kerja dan keperluan kantor lainnya	2 Paket	
13.	Ordner dan Box File	250 Box	

c. Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana dan Inventaris Kantor

No	Uraian Pekerjaan / Pemeliharaan	Volume	Ket.
1.	Personal Komputer	12 Bulan	
2.	Notebook/Laptop	12 Bulan	
3.	Printer	12 Bulan	
4.	LCD Proyektor/Infocus	12 Bulan	
5.	Inventaris Kantor	12 Bulan	
6.	Mesin Absensi	12 Bulan	
7.	Peralatan Medis Elektronik	12 Bulan	
8.	Pintu Elektronik	12 Bulan	
9.	Faximile	12 Bulan	
10.	Jaringan Teknologi Informasi	12 Bulan	
11.	Pemeliharaan Website	12 Bulan	
12.	Kendaraan roda 2 (Bensin, Perpanjangan Pajak STNK)	12 Bulan	
13.	Kendaraan roda 4 (Bensin, Perpanjangan Pajak STNK)	12 Bulan	
14.	Kendaraan roda 6 (Bensin, Perpanjangan Pajak STNK)	12 Bulan	

3. Pengelolaan Sarana Kerja Pengadilan yang meliputi :

- Melaksanakan Pencetakan Buku Agenda Sidang Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri sebanyak 4.396 buku;
- Melaksanakan Pencetakan Buku Agenda Sidang Panitera dan Jurusita sebanyak 4.985 buku;
- Melaksanakan Pencetakan Buku Statistik Perkara Perdata, Pidana dan PHI sebanyak 1.500 buku;

- Melaksanakan Pencetakan Register Perkara Pidana Anak sebanyak 7.162 register.
- Melaksanakan Pencetakan Register Perkara Perdata Niaga sebanyak 1.605 register;
- Melaksanakan Pencetakan Register Perkara Perdata PHI dan Register Keuangan PHI sebanyak 1.319 register;
- Melaksanakan Pencetakan Buku Bantu PT dan PN sebanyak 1.623 buku;
- Melaksanakan Pencetakan Buku Jurnal Keuangan Pengadilan Tinggi dan Buku Induk Keuangan PT sebanyak 452 buku;
- Melaksanakan Pencetakan Jurnal Keuangan Perkara PN dan Buku Jurnal Keuangan PHI sebanyak 7.620 buku;
- Melaksanakan Pencetakan Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Eksekusi dan Buku Penerimaan Uang hak-hak Kepaniteraan PN sebanyak 3.651 buku;
- Melaksanakan Pencetakan formulir Statistik Perkara Perdata, Pidana dan PHI sebanyak 70.000 lembar;
- Melaksanakan Pencetakan SKUM sebanyak 2.994 kwitansi;
- Melaksanakan Pengadaan Toga Hakim sebanyak 300 stel;
- Melaksanakan Pengadaan Jas Panitera sebanyak 292 stel;
- Melaksanakan Pengadaan Tanda Jabatan Hakim dan Panitera sebanyak 750 buah;
- Melaksanakan Pengadaan Laken Hijau sebanyak 10.130 meter.

D. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-005.03.1.097450/2015 Tanggal 14 November 2014 dengan satu (1) Program Kerja yaitu **“Peningkatan Manajemen Peradilan Umum”** dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 479/DJU/PL08/4/2012 tentang Pelaksanaan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas KKN.

Untuk Tahun Anggaran 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 121.619.500.000,- (seratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu (rp)	Realisasi (rp)	Presentasi (%)
1.	Belanja Pegawai	12.547.329.000	12.501.438.263	99.63%
2.	Belanja Barang	103.176.036.000	98.036.946.237	95.01%
3.	Belanja Modal	5.896.135.000	5.613.753.434	95.21%
JUMLAH		121.619.500.000	116.152.138.934	95.50%

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp 68.854.886.000,- (Enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 65.875.891.020,- (Enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah) dengan serapan sebesar 95,67%. Sedangkan untuk satker daerah alokasi anggaran sebesar Rp 52.764.614.000,- (Lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.276.247.914,- (Lima puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dengan prosentase penyerapan sebesar 95,28% sehingga jumlah alokasi seluruhnya sebesar Rp 121.619.500.000- (seratus duapuluh satu miliar enam ratus sembilas belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi Rp 116.152.138.934,- (Seratus enam belas milyar seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga daya serap sebesar 95,50%.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015

No	Kode dan Nama Kegiatan	Anggaran			Kinerja (%)			
		Pagu	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi		
(005.03.07)								
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM								
1.	(1046) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	31.770.496.000	Rp.	30.271.069.863	95,28%	100%	100%
2.	(1047) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	Rp.	795.284.000	Rp.	788.426.482	99,14%	100%	100%
3.	(1048) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi	Rp.	805.582.000	Rp.	770.044.540	95,59%	100%	100%
4.	(1049) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	58.333.244.000	Rp.	55.699.051.465	95,48%	100%	100%
5.	(1051) Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum	Rp.	197.000.000	Rp.	181.892.100	92,33%	100%	100%
6.	(1052) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp.	29.717.894.000	Rp.	28,424.854.405	95,71%	100%	100%
JUMLAH		Rp.	121.619.500.000	Rp.		95,50%	100%	100%

E. Dukungan Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memanfaatkan Teknologi Informasi antara lain:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang dikenal dengan Case Tracking System (CTS), dimana para pihak berperkara dapat mengakses proses berjalannya perkara mereka melalui aplikasi berbasis web. Aplikasi SIPP/CTS, atas bantuan proyek *Changes For Justice (C4J)* USAID, kini sudah semakin disempurnakan dengan hadirnya Versi 3 dari aplikasi tersebut. Versi 3 aplikasi CTS ini dibuat oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 87/DJU/SK/HM02.3/6/2015 tentang pembentukan Tim Pengembangan system Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. E-Learning merupakan cara baru berinteraksi antara pemateri/narasumber dengan peserta melalui media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. E-Learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada Tahun 2016 Badan Peradilan Umum telah hadir E-Learning, bermanfaat sebagai wadah untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi terhadap kebijakan/peraturan baru kepada satuan kerja di bawah nya menambah dan sebagai pusat materi/bahan ajar yang bisa di akses oleh seluruh stakeholder peradilan dalam rangka menambah dan meng-update wawasan/pengetahuan tentang peradilan umum. E-Learning yang berjalan saat ini masih bersifat *asynchronous* (satu arah). Kedepannya, sistem e-learnig akan dikembangkan menjadi *synchronous* (dua arah) di mana antara pemateri/narasumber dapat berinteraksi langsung dengan peserta melalui media *teleconference*.
3. Perangkas Keras (Hardware)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum khususnya Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana, masing – masing bagian mempunyai titik jaringan internet sesuai dengan jumlah kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan Staf. Perangkat ini juga di dukung oleh sarana berupa PC dan Laptop.
4. Perangkat Lunak
Sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No 14 Tahun 2010 Jo Sema No 01 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan

Kasasi/Peninjauan Kembali Direktorat Pranata dan Tata laksana Pidana dalam melaksanakan penelaahan berkas menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan sistem Informasi Aplikasi Perkara (SIAP) versi 2. Namun dalam melaksanakannya seringkali mengalami hambatan diantaranya tidak bisa dibuka.

F. Regulasi Tahun 2015

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2015, tentang Pendelegasian penilaian prestasi kerja dan wewenang pendatanganan Penilaian Prestasi kerja di Lingkungan MA.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/KMA/SK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Tim Perumus Kebijakan Pra Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/KMA/SK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 01/DJU/KP.00.1/1/2016 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 07/DJU/KP.04.5/9/2015, tentang Ketentuan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Umum.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 05/DJU/KP.04.5/7/2015, tentang Pengusulan Dan Pengangkatan Hakim Karir Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum.
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 03/DJU/PL.07/4/2015, tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta kekayaan ASN (LHKASN) di Lingkungan Peradilan Umum.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 01/DJU/KP.04.5/3/2015, tentang Laporan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Bagi Tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Umum.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1811/DJU/SK/OT.01.3/10/2015, tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum T.A 2015.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/1/2015, tentang Standar Operasional Prosedur Badan Peradilan Umum.
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor : 1197/DJU/SK/KP.04.5/6/2015 tentang Penunjukkan Panitia Pembantu Tim Sekretariat Perencanaan Bahan Rapat II Tim Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015.
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Nomor : 1198/DJU/SK/KP.04.5/6/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penunjukan Tim Sekretariat dalam Perencanaan Bahan Rapat II Tim Promosi dan Mutasi (IPM) Hakim di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Tahun Anggaran 2015.
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1029/DJU/SK/PP.00.4/4/2015 tanggal 30 April 2015 tentang pembentukan Tim Pelaksana Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA Khusus di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 376/DJU/PP.00.4/4/2015 tanggal 30 April 2015 tentang pemanggilan peserta Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Klas IA Khusus di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015.
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1405/DJU/SK/PP.00.1/7/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang pembentukan Tim Pelaksana Uji Kepatutan dan Kelayakan/ Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 583/DJU/PP.00.1/7/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang pemanggilan peserta Fit and

Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015.

15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 587/DJU/KP.01.2/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang pemanggilan peserta untuk mengikuti profile assessment calon sekretaris tim pemeriksa pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I tahun 2015, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 583/DJU/PP.00.1/7/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang pemanggilan peserta untuk mengikuti seleksi dan uji kelayakan calon pimpinan pengadilan tingkat banding tahun 2015 a.9. Rapat Tim Promosi Mutasi I Hakim di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan surat undangan nomor 259/DJU/KP04.5/3/2015 tanggal 12 Maret 2015, dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2015 berupa kegiatan Rapat Diluar Jam Kantor (RDJK) di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
16. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 800/DJU/PP.00.1/9/2015 tanggal 23 September 2015 tentang pemanggilan peserta profile assessment.
17. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 388/DJU/PP.00.2/5/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang pemanggilan peserta untuk mengikuti seleksi Calon Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan Pengadilan Negeri Klas IA T.A. 2015.
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1913/DJU/SK/PP.00-1/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015, berupa penunjukkan peserta pembinaan Hakim crash program dalam implementasi dan penegakkan hukum Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R. I Tahun 2015
19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 931/DJU/PP.00-1/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015, berupa pemanggilan peserta pembinaan Hakim crash program dalam implementasi dan penegakkan hukum Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R. I Tahun 2015.
20. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peadilan Umum Nomor 2021/DJU/SK/OT01.3/12/2015, tentang Pembentukan Komite Keputusan

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

21. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peadilan Umum Nomor 1443/DJU/SK/OT01.2/8/2015, tentang Penunjukan Petugas Notulis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
22. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peadilan Umum Nomor 336/DJU/SK/HM00/3/2015, tentang Penunjukan Tim Pengelola Majalah Dandapala Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
23. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peadilan Umum Nomor 12/DJU1/SK/HM.02.3/1/2015, tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
24. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peadilan Umum Nomor 13/DJU/SK/HM02.3/1/2015, tentang Penunjukan Pengelolaan Teknologi Informasi Terpadu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
25. SK Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65a/SEK/SK/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pengangkatan, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar/ SPM), Bendahara Pengeluaran (Penerimaan/PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun anggaran 2015.
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA. 005.03.1.097450/2015 tanggal 14 November 2014.
27. Penanganan berkas perkara kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Umum dan Khusus ada beberapa hal yang dianggap sama satu dengan yang lainnya, akan tetapi ada juga perbedaannya dalam hal tenggang waktu menelaah berkas perkara, dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138 tahun 2009. Berkas perkara kasasi dan PK perdata umum jangka waktu penanganannya selama di Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata adalah 14 (empat belas) hari, sedangkan untuk perkara kasasi dan PK perdata khusus jangka waktunya adalah 2 (dua) hari, kecuali

berkas tersebut masih terdapat kekurangan, maka harus dimintakan kelengkapannya kepada Pengadilan Pengaju melalui proses surat menyurat.

28. *Job Description* Hakim Yustisial yang di pekerjaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka menuju “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung” sebagai visi Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu eselon I berupaya meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai Pembinaan terhadap satuan kerja (unit pelaksana teknis) dibawahnya dan terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum antara lain:

1. Pengawasan terhadap jam kerja dari mulai jam masuk hingga jam pulang kantor oleh seluruh pimpinan secara berjenjang;
2. Mengadakan Pembinaan berupa Peningkatan Disiplin berdasarkan SK Ketua MA No 071/SK/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Peningkatan Kinerja baik terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan maupun terhadap satuan kerja dilingkungan peradilan umum;
3. Memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) berupa promosi atau mutasi terhadap tenaga teknis hakim maupun panitera;
4. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia;
5. Melaksanakan Pembinaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serab anggaran di seluruh satuan kerja dilingkungan peradilan umum;
6. Menindaklanjuti surat-surat pengaduan dari Pengadilan Tinggi untuk dilanjutkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.;
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara *E- Procurement* dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJ)
8. Pengawasan terhadap Pemanfaatan dan Pelaksanaan Anggaran yang diwujudkan nyatakan melalui Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 479/DJU/PL08/IV/2012 tentang Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

9. Memonitor ke Pengadilan yang menerima Anggaran Bantuan Hukum, Sidang Diluar Gedung Pengadilan serta Pembebasan Biaya Perkara, mengenai pelaksanaan dan penyerapan anggaran tersebut.
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada seluruh Pengadilan Tinggi sebagai acuan untuk menindak Pengadilan Negeri yang kurang rajin dalam melaksanakan aplikasi SIPP.

B. Evaluasi

1. Mengevaluasi data-data yang masuk dari pengadilan-pengadilan yang telah di monitoring yaitu administrasi peradilan umum dan kebutuhan sarana kerja pengadilan.
2. Mengevaluasi pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Bantuan Hukum, Sidang Diluar Gedung Pengadilan serta Pembebasan Biaya Perkara.
3. Mengevaluasi pelaksanaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serab anggaran di seluruh satuan kerja dilingkungan peradilan umum melalui pemanggilan terhadap satker yang daya serabnya masing rendah.
4. Mengevaluasi pelaksanaan Aplikasi SIPP di setiap Pengadilan Negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melangkah dengan pasti menuju “Terwujudnya Peradilan Umum Yang Agung” dengan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerjanya setelah sebelumnya tahun 2014 telah melaksanakan Penilaian Kinerja terhadap Pengadilan seluruh Indonesia.

Tahun 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mencapai keberhasilan antara lain:

1. Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai Standar Sertifikasi ISO 9001:2008 dengan penerapan *International Framework Court Excellence*, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan, Zona Integritas dan Standar Penilaian Kinerja Pengadilan yang sudah dilaksanakan tahun 2014 yang lalu;
2. Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan ini telah dilaksanakan pada dua (2) pengadilan sebagai tahap awal yaitu Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang selanjutnya akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri lainnya;
3. Diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 di unit Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
4. Melaksanakan Profile Assesment terhadap Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus dan I A yang akan menjalani Fit and Proper Test;
5. Melaksanakan Profile Assesment terhadap Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, yang akan menjalani Fit and Proper Test;
6. Melaksanakan Profile Assesment terhadap Calon Sekretaris Badan Pengawas.
7. Melaksanakan Profile Assesment Panitera/ Sekretaris yang akan menjalani Fit and Proper Test;
8. Melaksanakan Pembinaan terhadap Hakim Crash Program asal Nangroe Aceh Darussalam dalam Implementasi dan Penegakan Hukum Pengadilan Negeri;

9. Aplikasi SIPP/CTS versi 3 yang merupakan aplikasi berbasis web telah diimplementasikan oleh satuan kerja di seluruh Indonesia;
10. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat peringkat ke tiga dilingkungan Mahkamah Agung RI dalam penyerapan anggaran yaitu sebesar 95,19%.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan antar unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan, pelatihan kepribadian dan kepemimpinan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun pada satuan kerja daerah;
3. Perlu peningkatan implementasi yang berorientasi dibidang pemanfaatan penggunaan informasi teknologi dalam bentuk aplikasi dan pengembangannya.